

**PERAN KSPPS / BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA SEMARANG  
DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN ANGGOTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam



Oleh:

**INNE FEBRIANY**

**NIM. 1405026046**

**EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2019**

**Drs. H. Wahab, MM.**  
Bangetayu, Wetan RT/RW.03/01 Genuk

**Arif Efendi, SE.M. Sc**  
Poncoharjo RT/RW. 03/02 Kec. Bonang, Kab. Demak

---

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (lima) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n Sdri. Inne Febriany

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Inne Febriany  
Nomor Induk : 1405026045

Judul : **“Peran KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang  
dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Anggota”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

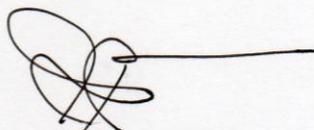
Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Semarang, 7 Desember 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



**Drs. H. Wahab, MM.**  
NIP. 19690908 2000031001



**Arif Efendi, SE.M. Sc**  
NIP. 19850526 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691,  
Semarang, KodePos 50185

PENGESAHAN

Nama : Inne Febriany  
NIM : 1405026046  
Judul : Peran Kspps Bmt Nusa Ummat Sejahtera Semarang dalam  
Meningkatkan Literasi Keuangan Anggota

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal : 9 Januari 2019

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu  
(S1) tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 9 Januari 2019

Ketua Sidang

Dr. Ari Kristin Prastyeningrum, S.E. M.Si

NIP. 197905122005012004

Sekretaris Sidang

Drs. H. Wahab, MM

NIP.196909082000031001

Penguji I

Drs. Musahadi, M.Ag

NIP. 19690709 199403 1 003

Penguji II

Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag

NIP. 19670119 199803 1 002



Pembimbing I

Drs. H. Wahab, MM

NIP.196909082000031001

Pembimbing II

Arif Afendi, S.E.M.Sc

NIP.198505262015031002

## MOTTO

وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُودِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَّا يُودِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“Di antara ahli kitab (Taurat) ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikan kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar (koin emas), tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian (standar ganda) itu lantaran mereka mengatakan, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi (bangsa Arab).” Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.”

(Al-Qur’an, Ali ‘Imran [Keluarga Imran], 3: 75)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, sembah sujud serta syukur kepada Allah Swt. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberiku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ucapan rasa syukur dan kerendahan hati saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Khujer Yahya dan Ibu Mulyani yang selalu mendoakan dengan rasa kasih dan sayangnya serta ridhonya demi kelancaran studi penulis di UIN Walisongo Semarang. Terima kasih atas doa kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat penulis persembahkan.
2. Adiku Ananda Irvan Mulyana, tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama denganmu. Walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan.
3. Keluarga besarku bani Suharto, terimakasih banyak akan suport dan doa kalian semua.
4. Tunanganku, Wajidin Nur Khofik, terimakasih atas suport materil dan non materilnya sehingga penulis bisa mencapai tahap ini. Semoga kau adalah calon teman hidup yang terbaik dari Allah SWT di masa depan.
5. Negaraku Indonesia yang telah memberiku dukungan materil maupun non materil melalui beasiswa BIDIKMISI sehingga penulis dapat belajar di kampus tercinta pilihan pertama UIN Walisongo Semarang.
6. Pihak lembaga keuangan KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang khususnya Bapak Kholidin selaku manajer, berkat kesediaan waktu dan keterbukaannya saat penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Teman-temanku seangkatan dan seperjuangan terkhusus EIB'14, terima kasih atas bantuan, nasehat, hiburan, traktiran, ojekan dan semangat yang kalian berikan selama ini, terima kasih buat waktu selama di Semarang, candaan kalian aku tak akan melupakan kalian.

Terima kasih atas kebaikan kalian semua, semoga Allah Swt membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal, Aamiin ya Mujibassailin.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang telah penulis selesaikan yang berjudul “Peran Kspps / Bmt Nusa Ummat Sejahtera Semarang Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Anggota” benar-benar karya penulis dan sama sekali tidak berisi materi tulisan orang lain ataupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan yang dilakukan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Semarang, 9 Januari 2019

Inne Febriany

NIM. 1405026046



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax.  
7624691 Semarang 50185

---

---

**PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF**  
**ARAB KE HURUF LATIN**

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ى = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَي = ay

وَأ =aw

D. Syaddah ( ّ )

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang diberi tanda tasydid misal = الطَّبّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ( ال ) ditulis dengan *al-...* misalnya الحمدون = *al-hamidun*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah ( ة )

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

G. (... ال)

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ( ال ) ditulis dengan *al-...* misalnya الحمدون = *al-hamidun*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

H. Ta' Marbutah ( ة )

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

## ABSTRAK

Literasi keuangan merupakan dasar dari pengelolaan keuangan yang baik. Salah satu kecerdasan yang harus dimiliki oleh manusia modern adalah kecerdasan finansial, yaitu kecerdasan dalam mengelola aset keuangan pribadi dengan menerapkan cara pengelolaan keuangan yang benar, maka seseorang diharapkan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari uang yang dimilikinya. Pada prinsipnya literasi keuangan merupakan alat untuk mencapai tujuan keuangan yang baik dan berkelanjutan hanya saja pada kenyataannya tidak semua orang memiliki literasi keuangan yang tinggi sehingga mengerucutkan peluang mencapai kesejahteraan. KSPPS BMT NUS sebagai lembaga keuangan yang ikut andil dalam perokonomian masyarakat menengah kebawah memiliki peran dalam meningkatkan literasi keuangan kepada anggotanya agar terciptanya perekonomian yang lebih baik. Anggota KSPPS BMT NUS adalah masyarakat yang menggunakan produk maupun jasa keuangan yang ada dalam KSPPS BMT NUS. Lantas bagaimanakah peran KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang dalam meningkatkan literasi keuangan anggotanya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dan peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara, dokumentasi dimana penelitian ini akan dilakukan dengan cara menulis, mengklasifikasikan dan menjadikan data yang diperoleh dari sumber lapangan. Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian., peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dan dokumentasi kepada manajer KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang.

**Kata kunci:** Peran, Literasi Keuangan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Muhammad Saw., keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. skripsi yang berjudul “PERAN KSPPS/BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA SEMARANG DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN ANGGOTA”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Faluktas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Eknomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik moril maupun spiritual, maka dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta Wakil-wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Saifullah, M.Ag.selaku Dosen Wali.
4. Bapak Drs. H. Wahab, MM. selaku wakil Dekan II sekaligus Pembimbing I
5. Bapak Arif Afendi,S.E.M.Sc selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya.

7. Teman-teman seperjuangan, keluarga EIB'14 serta kawan-kawan yang telah memperoleh gelar S.E terlebih dulu.
8. Keluarga besar KKN 69 Posko 20 (Kuripan) yang dipimpin oleh Kordes Miftah beserta anggotanya.
9. Keluarga besar organisasi KPMDB (Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes) komisariat UIN Walisongo Semarang.
10. Keluarga Besar organisasi IKAMANSABES (Ikatan Alumni MAN 1 BREBES).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian pada bidang ini masih penulis harapkan.

Semarang, 9 Januari 2019

Penulis

**Inne Febriany**

NIM. 1405026046

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>DEKLARASI</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTARTABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Metodologi Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian .....	13
2. Lokasi Penelitian .....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Metode Pengumpulan Data .....	15
5. Metode Analisis Data.....	16
F. Sistematika Penelitian .....	17

## **BAB II PERAN, LITERASI KEUANGAN DAN BMT**

A. Konsep Peran	
1. Pengertian Peran .....	19
2. Aspek-aspek Peran .....	19
3. Dimensi Peran .....	20
B. Literasi Keuangan	
1. Pengertian Literasi Keuangan .....	21
2. Dasar Hukum Literasi Keuangan .....	22
3. Pendorong Literasi Keuangan .....	28
4. Bentuk-bentuk Literasi Keuangan .....	30
5. Strategi Literasi Keuangan .....	31
C. KSPPS BMT NUS Semarang dalam meningkatkan literasi keuangan .....	32
D. Baitul Mal Wa at-Tamwil (BMT)	
1. Pengertian Baitul Mal Wa at-Tamwil .....	33
2. Asas dan Prinsip Dasar BMT .....	34
3. Fungsi BMT .....	34
4. Pendiri BMT .....	35
5. Permodalan dan Penghimpunan Dana BMT .....	36
6. Status BMT .....	40
7. Pembiayaan BMT .....	40

## **BAB III PROFIL KSPPS BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA SEMARANG**

A. Sejarah KSPPS BMT NUS Semarang .....	43
B. Visi dan Misi KSPPS BMT NUS Semarang .....	45
C. Struktur Organisasi .....	45
D. Hukum Syar'i KSPPS BMT NUS Semarang .....	48
E. Tujuan KSPPS BMT NUS Semarang .....	49
F. Sarana dan Prasarana KSPPS BMT NUS Semarang .....	50

G. Layanan KSPPS BMT NUS Semarang .....	51
---	----

**BAB IV PERAN KSPPS BMT NUS SEMARANG DALAM  
MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN ANGGOTA**

A. Peran KSPPS BMT NUS Semarang	
1. Pendidik (Edukasi) Literasi Keuangan kepada Anggota .....	54
2. Penyedia Sarana dan Prasarana Literasi keuangan .....	56
3. Penyedia Produk dan Jasa untuk Literasi Keuangan .....	57
B. Optimalisasi Literasi Keuangan KSPPS BMT NUS Semarang .....	59

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel1 : Tabel data masyarakat miskin di Semarang.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Kantor Cabang KSPPS BMT NU Sejahtera Semarang.

Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara.

Lampiran 3 Daftar Beberapa Anggota KSPPS BMT NU Sejahtera Semarang

Lampiran 4. Surat Riset.

Lampiran 5. Dokumentasi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara maju dapat dilihat dari aspek kesejahteraan ekonomi penduduknya sedangkan masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan memperoleh uang dengan usaha yang keras. Banyak orang berusaha mengejar kemajuan keuangan dengan tenaga yang kuat di awal dan menurun di tengah-tengah. Masyarakat Indonesia masih tergolong masyarakat yang masih tertinggal dalam mengatur keuangan pribadinya hal itu terbukti dari sikap konsumtifnya yang masih sangat besar dibanding sifat produktifnya atau dengan kata lain banyak masyarakat yang berjiwa pekerja dibanding berjiwa berwirausaha. Sebagian pekerja setelah mendapat hasil uang yang diperoleh digunakan untuk konsumsi yang berlebihan tanpa mengatur keuangan yang lebih efisien dan tidak jarang pada akhirnya memiliki hutang di mana-mana, dalam hal ini lembaga keuangan memiliki peran penting dalam pemberian akses keuangan bagi masyarakat. Sebagai umat muslim di dunia ini hendaknya kita memiliki sikap manajemen khususnya dalam bidang keuangan, hal ini terdapat dalam firman Allah SWT :

فَدَجَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15) يَهْدِي اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya : “*sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus*” (Q.S Al-Maidah: 15-16)

Ayat di atas mengingatkan bahwa untuk dapat mengelola kehidupan di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan segala sumber daya yang disediakan oleh Allah SWT secara bertanggungjawab, diperlukan pengetahuan, wawasan, keterampilan

dan sikap yang profesional dalam mengatur apapun termasuk menggunakan rejeki berbentuk uang.<sup>1</sup>

Sektor lembaga keuangan di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kantor cabang, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terhimpun, dan kredit yang disalurkan oleh pihak lembaga keuangan.<sup>2</sup> Untuk mengurangi masalah keuangan yang telah terjadi pada masyarakat maka perlu adanya pengetahuan dalam menggunakan uang pribadinya secara bijaksana yang disebut dengan literasi keuangan. Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, literasi berarti kesanggupan membaca dan menulis. Dalam hal finansial, literasi keuangan dapat diartikan sebagai kecakapan atau kesanggupan dalam hal keuangan.<sup>3</sup> Forum keuangan yang berada di Washington, D.C yang bernama *Jumpstart Coalition for Personal Financial Literacy* pada tahun 2009 membagi pengetahuan keuangan dalam topik-topik pendapatan, pengelolaan uang, tabungan dan investasi, dan pinjaman atau kredit.

Literasi keuangan tidak hanya melibatkan pengetahuan dan kemampuan untuk menangani masalah keuangan, tetapi juga atribut nonkognitif. Sikap seseorang merupakan penentu dalam unsur penting terhadap literasi finansial individu. Sikap keuangan diartikan sebagai karakteristik psikologis seseorang yang berkaitan dengan masalah keuangan pribadi. Sikap keuangan seperti sikap terbuka terhadap informasi, menilai pentingnya mengelola keuangan, tidak impulsif dalam konsumsi, orientasi ke masa depan, dan tanggung jawab.<sup>4</sup>

Otoritas Jasa Keuangan pernah mengadakan survei pada tahun 2013 untuk menilai tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia. Sebanyak 19.6% atau sekitar

---

<sup>1</sup>Didin Hafidhuddin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm 1.

<sup>2</sup>Rike Setiawati, "Literasi Keuangan Islam (suatu Telaah Literatur)", *Journal economia* 2015.

<sup>3</sup>Tim Penyusun KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Jakarta: Balai Pustaka, 2016

<sup>4</sup>Irin Widayati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya", *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 2012.

50 juta penduduk Indonesia masih belum memiliki akses terhadap jasa-jasa keuangan dan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2016, bahwa terdapat 67,8% masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan, namun hanya 29,7% masyarakat yang *well literate*. Mayoritas merupakan penduduk pedesaan yang masih belum memiliki pengetahuan mengenai jasa-jasa perbankan, atau dengan kata lain tidak memiliki literasi keuangan yang baik. Hal ini sangat disayangkan mengingat desa merupakan daerah otonom terkecil yang sedang didorong percepatan ekonominya dengan pemberian dana sebesar 1 M untuk tiap desa.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada tahun lalu indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah. Sedangkan pada negara berpenghasilan rendah, jangkauan keuangan jauh lebih terbatas. Begitu pula dengan produk keuangan yang lebih canggih biasanya hanya akan diakses oleh sebagian kecil dari populasi saja. Peranan literasi keuangan pada negara berkembang juga akan lebih fokus untuk meningkatkan akses keuangan serta pelayanan keuangan. Selain itu, yang menjadi perbedaan antara negara berkembang dengan negara maju adalah masyarakat pada negara berkembang lebih banyak menggantungkan hidupnya pada usaha mikro sebagai sumber penghasilan mereka, maka dari itu masyarakat di negara berkembang lebih relevan terhadap kemampuan finansial seperti pengelolaan modal, keterampilan bisnis dan pemahaman daripada tipe masyarakat seperti para pekerja di negara maju yang menerima gaji.<sup>5</sup>

Literasi keuangan merupakan hal penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Seseorang dengan literasi keuangan yang baik akan mampu melihat uang dengan sudut pandang yang berbeda dan memiliki kendali atas kondisi keuangannya. Orang tersebut akan tahu apa yang harus dilakukan dengan uang yang sedang dimiliki dan bagaimana cara memanfaatkan uang agar dirinya tidak diperbudak oleh uang. Salah satu kecerdasan yang harus dimiliki oleh manusia modern adalah kecerdasan finansial, yaitu kecerdasan dalam mengelola aset keuangan pribadi. Dengan menerapkan cara pengelolaan keuangan yang benar, maka seseorang diharapkan

---

<sup>5</sup>OJK, *Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia dan Inklusi Keuangan*, 2016.

bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari uang yang dimilikinya. Literasi keuangan terjadi ketika individu memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.

Keputusan ekonomi yang cerdas terindikasi dari sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan benefit karena pada prinsipnya literasi keuangan merupakan alat yang berguna untuk merubah perilaku dari tidak cerdas menjadi cerdas seperti bagaimana memanfaatkan pendapatan untuk menabung, berinvestasi, proteksi dan memenuhi kebutuhan hidup. Membuat keputusan ekonomi yang cerdas adalah suatu pilihan, dan pilihan ini memerlukan upaya. Selain upaya maka individu juga perlu memahami syarat-syarat yang tepat guna membuat keputusan ekonomi sehari-hari. Terkait upaya dan persyaratan tersebut maka literasi keuangan menjadi suatu pilihan yang sebaiknya dimiliki oleh seseorang. Hanya saja pada kenyataannya tidak semua orang memiliki literasi keuangan yang memadai guna membuat keputusan yang cerdas.<sup>6</sup>

Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak dan sebagian besar masih menghadapi kendala dalam kesejahteraan hidup. Hal ini dapat dilihat dari indikasi pendapatan per kapita masyarakat yang baru mencapai sebesar US\$2600. Dengan pendapatan per kapita sebesar itu, perlu pengelolaan yang baik, sehingga dapat mengoptimalkan pengalokasiannya. Di samping itu penggunaan sumber pembelanjaan, pengelolaan risiko, dan penyiapan dana pensiun yang tepat perlu dipikirkan lebih mendalam. Untuk itu perlu adanya kesadaran terkait mencapai kemerdekaan keuangan, yakni jika mampu menyelaraskan antara penggunaan dana dengan pendapatannya.

---

<sup>6</sup>Karvof A, *Cara Cerdas Meraih Kekayaan dan Keberkatan Finansia*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010.

Disamping itu keamanan keuangan di masa depan terjamin, dan antisipasi terhadap kerugian yang besar di masa mendatang.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya literasi keuangan merupakan alat untuk mencapai tujuan, hanya saja pada kenyataannya tidak semua orang memiliki literasi ekonomi yang tinggi sehingga mengkerucutkan peluang mencapai kesejahteraan. Rendahnya literasi keuangan berdampak pada kesejahteraan, oleh karena itu prioritas untuk meningkatkan literasi keuangan menjadi suatu keharusan bagi individu ataupun keluarga yang ingin sejahtera. Peningkatan literasi keuangan secara spesifik berdampak positif pada akumulasi aset, akumulasi utang, proteksi, akumulasi menabung dan kecermatan mengelola pengeluaran.<sup>8</sup>

Berikut Tabel data jumlah masyarakat miskin di kota Semarang :

kota Semarang

Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
88.453	83.346	86.734	84.640	84.270	83.590	80.860

9

Berdasarkan data dari badan pusat statistik Semarang angka kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun penurunan yang terjadi masih sangat sedikit dan tidak seimbang dengan upaya besar pemerintah Semarang dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat Semarang masih memiliki tingkat literasi yang rendah. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah menaruh perhatian penuh terhadap literasi keuangan masyarakat Indonesia dimana peran lembaga

---

<sup>7</sup>Amanita Novi Yushita, "pentingnya literasi keuangan Bagi pengelola keuangan pribadi", Jurnal nominal, volume vi nomor 1, 2017.

<sup>8</sup>Peter Garlans Sina, "Analisis Literasi Ekonomi", Jurnal Economia, 2012

<sup>9</sup><https://semarangkota.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.htm>(diakses tanggal 5 maret 2018)

keuangan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan literasi keuangan. Sejauh ini Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga keuangan yang dapat membantu aktifitas pembiayaan masyarakat.

Lembaga BMT memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota dan untuk anggota maka berlandaskan Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi.<sup>10</sup> Bagaimana sebuah pengorganisasian dapat dipahami dari firman Allah :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا  
ءَاتَاكُمْ.....

Artinya : “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikanNya kepadamu” (Q.S Al An’am : 165)

Dalam ayat tersebut dikatakan Allah meninggikan seseorang diantara yang lain beberapa derajat. Ini artinya untuk kehidupan duniapun manusia yang satu dengan yang lain tidak sama. Dengan demikian bahwa bekerjasama dalam bisnis halal adalah *sunnatullah*. Didalam ayat tersebut juga dijelaskan bahwa kelebihan yang diberikan merupakan ujian dari Allah bagi mereka yang menjalankan lembaga keuangan BMT tersebut.<sup>11</sup>

Letak perbedaannya dengan koperasi konvensional (non syariah) salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja. Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menjadi negara dengan *Islamic Micro Finance* terbesar di dunia dengan 22.000 gerai koperasi syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai salah satu jenis koperasi syariah. Jumlah ini cukup signifikan mengingat secara hukum koperasi syariah baru didirikan pada tahun 2004. Program literasi keuangan ini juga sejalan dengan program Otoritas

---

<sup>10</sup>Peraturan Perundang-undangan RI /No.25/1992/Hukum Koperasi.

<sup>11</sup>T. Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2003, hlm.169.

Jasa Keuangan (OJK) yang meluncurkan kebijakan *financial literacy* pada 19 November 2013 di Jakarta. Misi literasi keuangan OJK adalah melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat Indonesia agar dapat mengelola keuangan secara cerdas. Meningkatkan akses informasi dan penggunaan produk jasa keuangan melalui pengembangan infrastruktur pendukung literasi keuangan.<sup>12</sup>

Adapun tujuan dari literasi keuangan adalah meningkatkan *awareness* dan pemahaman masyarakat mengenai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan. Program peningkatan literasi keuangan dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keyakinan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, dan mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan terhadap sektor jasa keuangan. Pemberian materi edukasi tentang literasi keuangan untuk setiap golongan masyarakat guna meningkatkan pemahaman produk dan jasa keuangan.

Literasi keuangan terbentuk dari beberapa komponen yaitu pengetahuan, keterampilan dan keyakinan. Masyarakat yang cakap keuangan perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai lembaga serta produk dan layanan jasa keuangan termasuk manfaat, fitur, risiko, hak, kewajiban, cara memperoleh, denda dan biaya. Pengetahuan tersebut perlu didukung dengan keterampilan untuk menilai manfaat dan resiko produk dan layanan jasa keuangan. Kedua komponen tersebut diharapkan dapat meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan. Upaya dimaksud dilakukan melalui penggunaan produk dan jasa keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan serta pengelolaan terencana dalam rangka mencapai kesejahteraan. Dengan sikap dan perilaku keuangan yang bijak akan menciptakan ketahanan keuangan yang lebih baik dalam berbagai kondisi keuangan.

Adapun tujuan dari strategi literasi keuangan bijak adalah membangun masyarakat yang memiliki ketahanan keuangan yang kuat dalam menghadapi berbagai kondisi keuangan termasuk guncangan keuangan. Kecakapan keuangan yang disertai

---

<sup>12</sup>Oman Rusmana Lilis Ardianti, “Analisis Perbedaan Literasi Keuangan Masyarakat Anggota Credit Union Dengan Anggota Baitut Tamwil”, 2013

dengan sikap dan perilaku keuangan yang bijak memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Oleh karena itu, diperlukan perluasan akses keuangan yang sebesar-besarnya guna memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Perluasan akses keuangan juga perlu didukung dengan pengembangan produk dan layanan jasa keuangan termasuk penciptaan skema-skema produk dan layanan jasa keuangan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Adapun tujuan dari strategi akses keuangan adalah meningkatkan jumlah pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat.<sup>13</sup>

Literasi keuangan dalam sektor makro yang berbasis pada prinsip islam memberikan dampak positif yang besar, karena dengan adanya peningkatan literasi keuangan pada semua golongan masyarakat diharapkan dapat membuat ekonomi Indonesia menjadi stabil karena sistem keuangan syariah melarang keras adanya riba dan kestabilan perekonomian akan mempengaruhi peningkatan ekspor dan investasi, pertumbuhan sector riil, ekonomi Indonesia akan semakin kokoh terhadap krisis global, menciptakan keadilan sebagai implementasi pancasila yaitu kesejahteraan sosial, sumber dana untuk pembangunan akan meningkat, dan intermediasi di sektor keuangan semakin membaik.<sup>14</sup>

BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang memiliki misi dalam mensejahterakan anggotanya dan kesejahteraan ekonomi anggotanya didasari oleh literasi keuangan yang baik.<sup>15</sup> BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang harus mampu mengubah pola pikir yaitu dari terbiasa instan langsung memanfaatkan uang saat mendapat pinjaman menjadi menciptakan modal dahulu dengan menabung secara rutin. Jika telah tercipta modal atau tabungan, baru memanfaatkan atau meminjam. Selain itu dan dapat mengubah kebiasaan seseorang dari tidak biasa menabung menjadi biasa menabung.

---

<sup>13</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan (Revisit)*, 2017, hlm 82-84.

<sup>14</sup>Agustianto, *Membangun Literasi Keuangan di Indonesia*, *Journal Economic*, 2014

<sup>15</sup>KSPPS NUS Semarang, *Company profile revisi*, 2017

Anggota BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang harus selalu mempunyai uang dalam bentuk tabungan yang terus meningkat dan selalu dapat memanfaatkan tabungan untuk meningkatkan jumlah untuk menciptakan aset, mempunyai tujuan untuk meningkatkan kondisi keuangan para anggotanya. Sampai pada tingkat mandiri dalam bidang keuangan *financial independence*.

Seseorang dapat dikatakan sudah mandiri dalam bidang keuangan apabila aset-aset yang dimiliki dapat menghasilkan pendapatan dan pendapatan dari aset-aset tersebut dapat membiayai semua pengeluaran hidupnya. Mandiri dalam bidang keuangan baru terjadi apabila seorang anggota mampu mencapai setidaknya kelas “berkecukupan”. Ciri-ciri berkecukupan adalah pendapatan pasif sudah mampu menutupi biaya hidup sehari-hari.<sup>16</sup>

Ada empat pola pengelolaan uang yang dipraktikkan oleh masyarakat, yaitu:

1. Utang dulu - dapat uang - bayar utang - belanja - utang lagi.
2. Dapat uang - belanja habis.
3. Dapat uang - belanja - menabung (dari uang sisa kalau ada).
4. Dapat uang - bayar utang - menabung/investasi - belanja.

Pola pengelolaan uang yang sudah mencapai tingkat literasi keuangan adalah pola keempat, yakni: dapat uang - bayar utang - menabung/berinvestasi - belanja. Berdasarkan perilaku konsumtif yang besar tanpa diimbangi dengan meningkatkan tabungan disertai dengan praktik lembaga keuangan yang tidak mengutamakan gerakan menabung atau simpanan bagi para anggota.<sup>17</sup>

Para anggota BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang yang tentunya sudah menerima layanan pembiayaan dari BMT seharusnya memiliki tingkat keefektifan dan keefesiensian yang tinggi dalam menggunakan dana dengan baik. Namun, dengan terjadinya beberapa pembiayaan bermasalah antara pihak bmt dan anggotanya

---

<sup>16</sup>Hartono, *Nasibmu di Dompemmu*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2012

<sup>17</sup>Oman RusmanaLilis Ardiant, “Analisis perbedaan literasi keuangan masyarakatanggotacreditunion dengan anggota baitut tamwil ”, 2013.

membuktikan bahwa perlu adanya peran dan upaya bmt dalam meningkatkan literasi keuangan anggota, karena pada dasarnya lembaga keuangan yang baik tidak hanya mencari keuntungan saja namun harus mampu menciptakan masyarakat yang mampu menggunakan dana dengan sebaik-baiknya dengan kata lain mampu memberdayakan anggotanya menuju ekonomi yang lebih baik.

Oleh karena itu penulis ingin memahami lebih dalam dan melakukan penelitian yang berjudul “Peran Kspps / Bmt Nusa Ummat Sejahtera Semarang Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Anggota”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan dua masalah dalam skripsi yaitu :

1. Bagaimana peran koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah / BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang terhadap literasi keuangan Anggota?
2. Bagaimana optimalisasi upaya KSPPS BMT NUS Semarang dalam meningkatkan literasi keuangan Anggota?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian :**

Mengetahui Bagaimana Peran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syariah / BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang terhadap literasi keuangan Anggota.

### **2. Manfaat Penelitian :**

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S-1) Ekonomi Islam, sesuai dengan jurusan dan keilmuan yang diketahui.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para Lembaga Keuangan, sebagai solusi untuk meningkatkan pemahaman akan literasi keuangan atau melek finansial.
- c. Bagi Pemerintah dan Perbankan, sebagai referensi agar dapat membantu meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia.

#### D. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang peningkatan literasi keuangan telah banyak diteliti pada masa sebelumnya untuk mendukung permasalahan agar lebih mendalam dan agar terhindar dari plagiarisme maka penulis akan melampirkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan diantaranya adalah:

1. Penelitian skripsi Daarman NababanIsfenti Sadalia, dengan judul : “*Analisis Personal Financial Literacy dan Financial Behaviour Mahasiswa Strata Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat.*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan dan kebiasaan dalam mengatur keuangan pada setiap mahasiswa strata 1 fakultas ekonomi universitas USU. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan variable *personal, financial literacy, financial behavior, collage, student*, dan hasil dari penelitian inii adalah tingkat *Personal Financial Literacy* diUSU Masih rendahyaitu sebesar kurangdari 60%, tingkat *financial Literacy* tinggi terhadap responden laki-laki, senior, kost, dan ipk lebih atau sama dengan 3, hal ini berbalik pada responden wanita, *Financial behavioryang* diharapkan tidak meningkat secara konsisten dengan *financial literacy*.
2. Penelitian skripsi oleh Irin Widayanti, yang berjudul “*faktor-faktor yang mempengaruhi literasi finansial Mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya*”, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan variabel literasi keuangan dan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Brawijaya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa yang mempengaruhi mahasiswa dalam literasi keuangan adalah status sosial ekonomi orangtua, pendidikan pengelolaan, kondisi keuangan pribadi, dan pembelajaran di perguruan tinggi.
3. Penelitian Rike Setiawati, yang berjudul “*Literasi Keuangan Islam (suatu Telaah Literatur)*” dengan variabel literasi keuangan dan keislaman dengan analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana telaah literatur tentang tingkat literasi keuangan islam atau syariah masyarakat. Hasil dari

penelitian ini adalah tingkat literasi keuangan dikalangan masyarakat masih rendah khususnya pada sektor perbankan hal ini didasari pada tingkat pengetahuan masyarakat tentang perbankan yang masih rendah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Indrawati, SE, M.Si. yang berjudul “*Determinan dan Strategi Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Perkotaan Di Kabupaten Jember*”, penelitian ini menggunakan variabel determinasi literasi keuangan dan strategi meningkatkan literasi keuangan, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinasi apa saja yang mempengaruhi literasi keuangan masyarakat kota kabupaten Jember dan bagaimana strategi yang baik untuk meningkatkan literasi keuangan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa, hanya 38,7% masyarakat Jember yang mengerti mengenai literasi keuangan yang dimana berarti masih rendahnya tingkat literasi keuangan. Gender, tingkat pendidikan, pendapatan mempengaruhi tingkat masyarakat dalam memiliki akun pada produk-produk keuangan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Peter Garlan Sina dengan judul “*Analisis Literasi Ekonomi*”, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui upaya meningkatkan literasi bagi individu maupun rumah tangga yang ingin mencapai kesejahteraan ekonomi. Variabel dalam penelitian ini adalah literasi keuangan, masyarakat, pengelolaan keuangan efektif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah rendahnya literasi ekonomi berdampak pada kesejahteraan ekonomi. Literasi ekonomi berdampak positif pada akumulasi aset, deakumulasi utang, proteksi, akumulasi menabung, dan kecermatan mengelola pengeluaran.

Setelah penulis melakukan pengamatan dan penelusuran, belum diketahui tulisan maupun penelitian yang secara mendetail membahas tentang “Peran Kspss / Bmt Nusa Ummat Sejahtera Semarang dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Anggota”. Penelitian yang akan penulis teliti adalah bagaimana peran KSPPS NU sejahtera Semarang meningkatkan literasi keuangan anggotanya dikarenakan anggota lembaga keuangan baik bank maupun non bank seharusnya memiliki tingkat literasi keuangan yang baik. Meskipun pokok bahasan sama, Namun kepustakaan maupun penelitian-penelitian sebelumnya nampak adanya perbedaan antara penelitian terdahulu

dengan penelitian yang sekarang, perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian dan pada variabel penelitian.

## **E. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah cara yang dilaksanakan seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasi dan menganalisis fakta yang ada ditempat penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran dalam pengetahuan, hal ini dilakukan untuk menemukan kebenaran.<sup>18</sup>

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan peneliti itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis berarti proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>19</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi, atau kelompok tertentu secara akurat.<sup>20</sup> Dalam hal ini penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mengetahui, mendeskripsikan bagaimana peran KSPPS BMT NUS Semarang dalam meningkatkan literasi keuangan anggota..

Pendekatan penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Digunakan pada

---

<sup>18</sup>Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010, h.13.

<sup>19</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2011, h.72

<sup>20</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 41

kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi yaitu pada skripsi ini melihat berbagai program peningkatan literasi keuangan anggota BMT NU Sejahtera Semarang.<sup>21</sup>

## 2. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan diteliti adalah KSPPS/BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang yang berlatarkan di Jl. Jenderal Sudirman No.49, Krobokan, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50141. Penelitian dilakukan selama 4 bulan, mulai bulan september - desember 2018.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.<sup>22</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah KSPPS BMT NUS Semarang. Disini peneliti akan mewawancarai pengelola KSPPS BMT NUS Semarang serta beberapa *sample* informan para penerima prmbiaya dan mengikuti program literasi keuangan KSPPS BMT NUS Semarang. Dalam penentuan *Sample* ini peneliti menggunakan metode *Snowball sampling* yaitu sebuah metode pengambilan sampel dimana ketika peneliti kurang mengerti tentang kondisi populasi yang menjadi target penelitiannya. Sehingga dari beberapa sampel yang diambil dan diketahuinya, iamengambil sampel lain dengan penjelasan atau arahan dari sampel yang dikenalnya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Sugiono, *Cara Mudah Menyusun SKRIPSI, TESIS, dan DISERTASI*, Bandung : Alfabeta,2016, hlm 24

<sup>22</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: PT.Pustaka Baru Press, 2015, hlm. 89

<sup>23</sup>Joko Ade Nursiyono, *Kompas Teknik Pengambilan Sampel*, Bogor: In Media,2014, hlm.26

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain, misalnya dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>24</sup>Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah catatan, notulen rapat, foto kegiatan, serta informasi lainnya yang dimiliki oleh KSPPS BMT NUS Semarang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara, untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. wawancara (*Interview*)

wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka dimana berfungsi sebagai teknik pengumpulan data yang telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh.<sup>25</sup>Informannya yaitu pengelola KSPPS BMT NUS Semarang dengan menggunakan metode *Snowball Sampling*. Pertanyaannya seputarperannya dalam meningkatkan literasi keuangan anggota.

b. Observasi (*observation*)

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan pengamatan yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>26</sup>Maka dalam hal ini peneliti akan

---

<sup>24</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2010, hlm 12

<sup>25</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2011, hlm 138.

<sup>26</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2011, hlm 145.

melakukan penelitian terkait program literasi keuangan KSPPS BMT NUS Semarang, dan bagaimana peran KSPPS BMT NUS Semarang dalam meningkatkan literasi keuangan anggota.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Sebagian besar berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal, dokumen pada KSPPS BMT NUS Semarang.

## 5. Metode Analisis Data

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh disajikan dalam laporan secara terperinci yang selanjutnya di reduksi, dirangkum, dan dipilah-pilah hal yang pokok dan memfokuskan pada hal yang penting.

b. Penyajian Data

Data yang diperoleh di kategorikan pada pokok permasalahan yang memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu dengan data lainnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data .

Dari tahapan analisis tersebut, peneliti akan menggunakan teknik analisa data tersebut untuk mereduksi data, pemaparan data, kemudian akan di simpulkan seperti uraian diatas.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 210-212

## **F. Sistematika Penulisan**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan sistematika yang berdasarkan pada telaah pedoman skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN walisongo semarang. Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penelitian ini terdiri dari 5 Bab sebagai berikut:

### **BAB I :**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Dalam metode penelitian terdapat sub bab mengenai jenis penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II :**

Pada bab ini berisi landasan teori mengenai konsep peran yang meliputi pengertian peran, aspek-aspek peran, dimensi peran dan teori konsep literasi keuangan yang diantara lain meliputi pengertian literasi keuangan, dasar hukum literasi keuangan, pendorong literasi keuangan, bentuk literasi keuangan, strategi literasi keuangan dan peran lembaga keuangan dalam meningkatkan literasi keuangan.

### **BAB III:**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang profil pengelolaan literasi keuangann KSPPS BMT NUS Semarang yang terdiri dari sejarah berdirinya BMT NU Sejahtera Semarang, visi dan misi, struktur organisasi, hukum syar'i, tujuan, sarana dan prasarana, layanan di KSPPS BMT NUS Semarang.

### **BAB IV:**

Bab ini menjelaskan peran KSPPS BMT NUS Semarang dalam meningkatkan literasi keuangan anggota dan optimalisasi KSPPS BMT NUS Semarang dalam meningkatkan literasi keuangan anggota.

## BAB V :

Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan tentang peran KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang dan saran untuk literasi keuangan anggota KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang.

## BAB II

### PERAN DAN LITERASI KEUANGAN

#### A. Peran

##### 1. Pengertian Peran

Peran artinya sesuatu yang harus ia lakukan demi terwujudnya sebuah tujuan yang diinginkan, sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia “peran” adalah suatu yang jadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.<sup>28</sup> Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto dalam skripsi Nizzamudin, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement yaitu penegakan hukum secara penuh.<sup>29</sup>

##### 2. Aspek-Aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan<sup>30</sup>, yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial yaitu anggota dan pihak KSPPS BMT NUS Semarang.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut, adapun perilaku anggota dalam program ini menjadi lebih fleksibel dalam mengelola

---

<sup>28</sup>Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. Cet I, (Jakarta: Pustaka Amani, 1997), hlm. 304.

<sup>29</sup>Nizamuddin, “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengamalan Ibadah Bagi Masyarakat Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar”, 2016.

<sup>30</sup>Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori Psikologi Sosial, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.215

keuangan usaha nya sehingga kemandirian ekonomi anggota menjadi lebih baik.

3. Kedudukan anggota dalam perilaku.
4. Kaitan antara anggota dan perilaku mengelola keuangannya

### **3. Dimensi Peran**

1. Peran sebagai suatu kebijakan.

Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. KSPPS BMT NUS memiliki kebijakan dalam meningkatkan literasi keuangan seperti kebijakan kewajiban menabung dan pemantauan secara rutin oleh KSPPS kepada anggota yang bergerak dalam usaha mikro kecil.

2. Peran sebagai strategi.

Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari Anggota KSPPS BMT NUS Semarang.

3. Peran sebagai alat komunikasi.

Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan anggota yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta :Walhi, 2003.

## B. Literasi Keuangan

### 1. Pengertian literasi keuangan

Menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa secara definisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami. Jadi literasi keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang. OJK mengatakan bahwa hal penting dari program literasi keuangan adalah untuk melakukan edukasi dibidang keuangan kepada masyarakat agar dapat mengelola keuangan secara pintar, agar rendahnya pengetahuan akan industri keuangan dapat diatasi dan masyarakat tidak akan mudah tertipu.<sup>32</sup>

Lisadan Bilalzia dalam penelitian Rike (2015) mengatakan bahwa istilah literasi keuangan mencakup konsep yang dimulai dari kesadaran dan pemahaman tentang produk-produk keuangan, institusi keuangan, dan konsep mengenai keterampilan keuangan seperti kemampuan untuk menghitung pembayaran bunga majemuk serta kemampuan keuangan yang lebih umum seperti pengelolaan uang dan perencanaan keuangan. Menurut Lisa dan Bilalzia, literasi keuangan memiliki implikasi yang berbeda tergantung dari tingkat pendapatan di negara tersebut. Pada negara-negara berpenghasilan tinggi, literasi keuangan dianggap sebagai pelengkap dari perlindungan konsumen. Salah satu tujuan utama dari pendidikan keuangan adalah untuk melengkapi setiap orang dengan kemampuan untuk merencanakan produk keuangan yang ada seperti perencanaan pensiun atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) serta untuk mengatur keuangan yang sehat.<sup>33</sup>

Definisi literasi keuangan sangat bervariasi, seperti beberapa diantaranya, Lusardi dan Mitchell (2007) mendefinisikan *literacy financial* sebagai pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya (*Knowledge and Ability*). Menurut Lusardi dan

---

<sup>32</sup>OJK, [www.OJK.go.id](http://www.OJK.go.id), diakses pada tanggal 20 september 2018

<sup>33</sup>Rike Setiawati, “*Literasi Keuangan Islam (suatu Telaah Literatur)*”, *Journal ecnomia* 2015.

Mitchell (2007) *The economic importance of financial literacy theory and evidence* dimana dijelaskan strategi literasi keuangan dilaksanakan dengan menggunakan strategi edukasi yang sesuai dengan kelompok atau dengan kata lain sesuai dengan tingkatan masyarakat seperti tingkat pendidikan, strata sosial, dan kelompok usia.<sup>34</sup>

Menurut Manurung dalam penelitian Amin (2017) menyatakan bahwa literasi keuangan adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya uang mereka, sedangkan menurut pendapat ahli Kaly, Hudson dan Vush dalam penelitian Amin (2017) mengartikan bahwa literasi keuangan sebagai kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-konsep keuangan dan untuk merubah pengetahuan itu secara tepat kedalam perilaku.<sup>35</sup>

Aktivitas dalam meningkatkan literasi adalah sosialisasi dan edukasi pengelolaan keuangan yang baik. KSPPS BMT NUS Semarang menanamkan program literasi keuangan untuk mengasah ketrampilan anggota dalam mengelola dana yang diberikan oleh KSPPS.

## **2. Dasar hukum Keuangan**

Dasar hukum literasi keuangan dibawah ini digunakan oleh KSPPS BMT NUS Semarang sebagai acuan dalam meningkatkan literasi keuangan anggota. Walaupun OJK tidak berhubungan langsung dengan KSPPS BMT NUS namun KSPPS berdiri dibawah naungan BPRS NU yang berhubungan langsung dengan OJK, dan juga izin operasional KSPPS BMT NUS Semarang masih didalam ranah wewenang dari OJK.

Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 76/POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat. Memutuskan bahwa :

---

<sup>34</sup>Lusardi, A & Mitchell, O.S, *BabyBoomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth*, *Journal of Monetary Economics*, 2007, hlm.205.

<sup>35</sup>Amin Hidayat, “Peran OJK dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan”, 2017.

Menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat.

Peraturan tersebut diantaranya adalah:

Pasal 2: (1) PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

(2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman di masing-masing PUJK.

Pasal 3: Tujuan Literasi Keuangan meliputi:

- a. Meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu; dan
- b. Perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Pasal 4: Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan adalah perencanaan dan pelaksanaan atas edukasi Keuangan, pengembangan infrastruktur yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

Pasal 5: (1) Kewajiban PUJK atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan sebagai program tahunan PUJK.

(2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan

berdasarkan prinsip: Terencana dan terukur, berorientasi pada pencapaian, berkelanjutan dan kolaborasi.

- (3) PUJK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 6: (1) Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan penyampaian materi Edukasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.

- (2) Materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mencakup informasi mengenai: pengelolaan keuangan, jenis industri jasa keuangan, produk dan layanan jasa keuangan termasuk karakteristiknya, yang terdiri dari: manfaat, biaya, dan risiko atas produk dan layanan jasa keuangan, hak dan kewajiban Konsumen, cara mengakses produk dan layanan jasa keuangan; dan informasi terkait dengan mekanisme transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan; dan d. perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan.

- (3) Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan metode Edukasi Keuangan.

Pasal 7: (1) Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk pendampingan kepada Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil, PUJK wajib paling kurang:

- a. Memastikan Konsumen menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang diperoleh untuk kegiatan usahanya

b.Membantu Konsumen dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan kegiatan usahanya dan

c.Mendukung kelancaran dan kesinambungan akses keuangan Konsumen. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 8: Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk simulasi, PUJK wajib mencantumkan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan simulasi.

Pasal 9: (1) Pelaksanaan pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan membangun dan mengembangkan sarana yang dapat mendukung Literasi Keuangan.

(2) Bentuk pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup penyusunan dan pembentukan database materi Edukasi Keuangan, penyediaan sumber daya manusia, dan pembangunan atau pengembangan sarana dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 10: (1) PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

(2) Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan: nama kegiatan, tujuan kegiatan, bentuk pelaksanaan, metode pelaksanaan, materi, sasaran dan jumlah peserta, jadwal dan wilayah, frekuensi pelaksanaan, sumber dan jumlah biaya, metode dan sarana pengukuran dan parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi.

- (3) Pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) PUJK.

Pasal 22 : (1) PUJK wajib membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

- (2) Pembentukan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berada pada fungsi atau unit berbeda atau fungsi atau unit yang sama.

- (3) Pembentukan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melekat pada fungsi atau unit lain kecuali pada fungsi atau unit manajemen risiko, audit internal, hukum, dan kepatuhan.

- (4) Dalam membentuk fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK mempertimbangkan: jumlah aset PUJK, jumlah kantor PUJK, jumlah produk dan/atau layanan jasa keuangan PUJK, jumlah Konsumen dan/atau , jumlah sumber daya manusia PUJK, dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan maka pembentukan fungsi atau unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dapat dilakukan secara terintegrasi pada entitas utama.

Pasal 23: (1) Fungsi atau unit Literasi Keuangan memiliki tugas, paling kurang:

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan
  - c. Memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- (2) Fungsi atau unit Inklusi Keuangan memiliki tugas, paling kurang:
- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan
  - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan
  - c. Memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat; dan d. memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan dalam rangka penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan.

Pasal 28: (1) OJK dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan OJK ini yang dilakukan oleh PUJK.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: peringatan lisan, . peringatan tertulis.

Pasal 30: Pelaksanaan Edukasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK sebelum terbitnya peraturan pelaksanaan atas peraturan OJK ini, tetap mengacu pada surat edaran OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.<sup>36</sup>

Dasar hukum diatas digunakan KSPPS BMT NU Sejahtera Semarang dalam meningkatkan literasi keuangan Anggota

### **3. Pendorong literasi keuangan individu**

#### a) Pengetahuan Keuangan (*Financial Knowledge*)

Menurut Hilgret& Jeanne (2003), kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip manajemen keuangan dan masalah-masalah keuangan bisa menjelaskan mengapa beberapa keluarga tidak mengikuti dianjurkan keuangan praktek, untuk memiliki pengetahuan keuangan maka perlu mengembangkan keahlian keuangan dan belajar menggunakan alat keuangan. Keahlian keuangan adalah sebuah teknik untuk membuat keputusan manajemen keuangan. KSPPS BMT NUS dalam meningkatkan literasi keuangan melakukan pengedukasian tentang pengelolaan keuangan yang baik yaitu setiap anggota akan didampingi sampai anggota memiliki kemandirian ekonomi karna pada dsarnya lembaga keuangan syariah memiliki dasar filsafah ummat.

#### b) Pengalaman Keuangan (*Experience Financial*)

---

<sup>36</sup>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /Pojk.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat.

Pengalaman keuangan adalah kemampuan untuk membuat pertimbangan atau pengambilan keputusan investasi untuk menentukan perencanaan dan pengelolaan investasi untuk mengetahui kegunaan manajemen keuangan untuk saat ini dan di masa mendatang. Anggota KSPPS BMT NUS Semarang akan di didik dan dilatih bagaimana perencanaan dan pengelolaan investasi dengan baik dan benar adalah untuk mencapai kesuksesan. Tentunya dalam hal ini kesuksesan dimaksud adalah ketenteraman, kenyamanan dalam hidup untuk sekarang dan di masa mendatang. Oleh karena itu perlu secara kritis untuk mengelola penghasilan.<sup>37</sup>

c) Tabungan dan pinjaman

Menurut Garman dan Forgue dalam penelitian Amanita (2017), tabungan adalah akumulasi dana berlebih yang diperoleh dengan sengaja mengkonsumsi lebih sedikit dari pendapatan. Dalam pemilihan tabungan, ada enam faktor yang perlu di pertimbang yaitu:

- tingkat pengembalian (persentase kenaikan tabungan),
- inflasi (perlu dipertimbangkan dengan tingkat pengembalian karena dapat mengurangi daya beli),
- pertimbangan pajak,
- likuiditas (kemudahan dalam menarik dana jangka pendek tanpa kerugian atau dibebani *fee*),
- keamanan (ada tidak nya proteksi terhadap kehilangan uang jika bank mengalami kesulitan keuangan, dan
- pembatasan-pembatasan (penundaan atas pembayaran denda yang dimasukkan dalam rekening dan pembebanan suatu transaksi tertentu).<sup>38</sup>

KSPPS BMT NUS dalam meningkatkan literasi keuangan menyediakan program wajib nabung berupa tabungan pendidikan, tabungan harian

---

<sup>37</sup>OJK “*Peran Strategis Ojk Dalam Mengembangkan Literasi Keuangan Yang inovatif*”, 2016.

<sup>38</sup>Amanita Novi Yushita, “*pentingnya literasi keuangan Bagi pengelolaan keuangan pribadi*”, Jurnal nominal, volume vi nomor 1, 2017.

dan tabungan sukarela yang dijalankan oleh anggotanya hal ini dilakukan agar peran KSPPS dalam meningkatkan literasi keuangan anggota dapat terlaksana dengan maksimal.

#### 4. Bentuk- bentuk literasi keuangan

- a) *Well literate*, yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Dari 600 Anggota di dalam KSPPS BMT NUS Semarang hanya 21,8 % anggota yang *well literate*. Hal ini dibuktikan melalui data peningkatan laba pada usaha anggota yang di survei lapangan oleh KSPPS BMT NUS.
- b) *Sufficient literate*, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Anggota KSPPS BMT NUS dalam hal ini berada diangka 75,6%.
- c) *Less literate*, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. Anggota KSPPS BMT NUS Semarang memiliki 2,6 % yang masih *Less literate*.
- d) *Not literate*, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.<sup>39</sup> 0.4% adalah besar prosentase anggota KSPPS BMT NUS yang *Not literate*.

---

<sup>39</sup>OJK, *Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia dan Inklusi Keuangan*, 2016.

## 5. Strategi Literasi Keuangan

Literasi keuangan tidak akan tercapai hanya dengan membangun kesadaran sektor keuangan saja melainkan harus ada strategi menunjang literasi tersebut yaitu :

- a. Literasi, yaitu perangkat utama dalam mewujudkan literasi yang baik. Tahap ini mengandung muatan mengenal basic knowledge dan basic skill dan memahami sektor keuangan dengan program program yang dijalankan dalam meningkatkan literasi keuangan. Seperti edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh KSPPS BMT NUS Semarang, hal ini searah dengan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK, nomor 76/POJK.07/2016 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi“PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan”

KSPPS BMT NUS menekankan literasi keuangan bagi anggota tidak lain bertujuan agar anggotanya menjadi *well literate*. Khususnya dapat menggunakan produk jasa keuangan yang ada di KSPPS BMT NUS sesuai dengan kebutuhan keuangannya.

- b. Penetrasi, merupakan tahapan lanjutan dalam mewujudkan literasi keuangan dalam tahap ini masyarakat sudah memiliki kesadaran kebutuhan layanan keuangan, kebutuhan paling penting dalam tahap ini adalah supply side layanan keuangan baik yang berupa produk maupun infrastuktur. Seperti dalam KSPPS BMT NUS Semarang menyediakan infrastruktur berupa kantor, agen, teknologi informasi. Bekerjasama dengan ranting Nu serta lembaga keuangan KSPPS NUS yang lainnya dengan melaksanakan program seperti seminar, diskusi, edu expo.
- c. Density, tahap dimana kondisi masyarakat sebagai konsumen dan lembaga jasa keuangan sebagai produsen sudah dalam kondisi memenuhi syarat untuk membangun jalinan kerjasama. Dalam hal ini yang paling penting adalah desain produk, dan layanan keuangan yang menarik

diterima oleh pasar. KSPPS BMT NUS dalam tahap ini mengupayakan literasi keuangan anggotanya menjadi lebih baik. Menyesuaikan produk jasa keuangan KSPPS BMT NUS dengan kebutuhan anggota sehingga literasi keuangan dapat berkembang. Seperti produk inovasi KSPPS BMT NUS Semarang berupa layanan loket dan tagihan.

- d. Delivery , merupakan tahap dimana literasi keuangan sudah terjadi ditandai dengan bahwa produk dan layanan keuangan dapat diterima oleh pasar. Tahap ini yang paling penting adalah lembaga keuangan harus memilih jalur distribusi yang dekat, mudah dijangkau oleh rakyat kecil, murah.<sup>40</sup> Dalam KSPPS BMT NUS ini dilakukan melalui program bimbingan pengelolaan usaha yang dilakukan secara langsung dari agen KSPPS BMT NUS .

### **C. KSPPS BMT NUS Semarang dalam meningkatkan literasi keuangan**

1. Edukasi dan sosialisasi literasi keuangan, yang di dukung dengan program inisiatif KSPPS BMT NUS Semarang yaitu :
  - a. Menyusun materi edukasi tentang literasi keuangan untuk setiap anggota guna meningkatkan pemahaman produk dan jasa keuangan.
  - b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi literasi keuangan untuk masyarakat umum. KSPPS mengadakan seminar literasi keuangan anggota ke perguruan tinggi islam dan madrasah-madrasah.
2. Penguatan infrastruktur literasi keuangan, yang didukung dengan menyiapkan prasarana pendukung literasi keuangan lainnya, yang didukung dengan program inisiatif :
  - a. Membangun sarana media komunikasi di dalam KSPPS BMT NUS.

---

<sup>40</sup>Nasron Wahid, *Membongkar Hegemoni Keuangan*, Jakarta : Gramedia , 2014, hlm 102.

- b. Menyiapkan SDM yang bersifat fleksibel pelaksana edukasi dan sosialisasi literasi keuangan.
  - c. Menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak seperti ranting NU, lembaga keuangan lain, dan MoU.
3. Pengembangan produk dan jasa keuangan yang didukung dengan program yaitu mengembangkan dan memasarkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan di dukung pula dengan program inisiatif :
- a. Menciptakan produk dan jasa yang terjangkau oleh semua golongan masyarakat.
  - b. Memperluas aksestabilitas
  - c. Meningkatkan kualitas pelayanan<sup>41</sup>

#### **D. Baitul Mal Wa at-Tamwil (BMT)**

##### **1. Pengertian BMT**

Perkembangan baru dalam dunia perbankan di Indonesia menunjukkan prospek lebih baik. Sejak ditetapkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dikuatkan dengan UUNo.10 Tahun 1998, tatanan sistem kelembagaan keuangan di Indonesia mengalami perubahan secara mendasar, diantara hasilperubahan tatanan sistem lembaga keuangan syariah adalah BMT Koperasi Syariah.

BMT atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang di operasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum akir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.

---

<sup>41</sup>Kspps Bmt 'Nu Sejahtera' Kota Semarang, *Company Profile*, 2017.

Modal merupakan bagian terpenting dalam aktivitas ekonomi, artinya modal dapat membuat aktivitas bisnis berjalan dengan lancar. Modal yang digunakan dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi dapat bersumber dari lembaga keuangan.

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan dan tagihan. Atau dalam pengertian lain diartikan bahwa lembaga keuangan adalah sebuah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi financial. Adapun fungsi dari lembaga keuangan adalah :

- Melancarkan pertukaran produk dengan menggunakan uang dan instrumen kredit.
- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman.
- Memberi pengetahuan dan informasi.
- Memberi jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat.
- Menciptakan dan memberikan likuiditas yaitu dana yang disimpan dapat dikembalikan pada waktu yang dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo.

## **2. Asas dan Prinsip dasar**

BMT didirikan dengan beraskan masyarakat yang salam.

Prinsip dasar BMT adalah:

- Ahsan (mutu hasil kerja terbaik), thayyiban (terindah), ahsanu ‘amala (memuaskan semua pihak) dan sesuai dengan nilai-nilai salam yaitu keselamatan, adil, kedamaian dan sejahtera.
- Barokah, artinya berdayaguna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- Penguatan nilai ruhiyah

- Demokrasi, partisipasi, dan inklusif
- Keadilan sosial dan kesejahteraan gender
- Ramah lingkungan
- Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal serta keanekaragaman budaya
- Berkelanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

### **3. Fungsi BMT**

- a) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus dan pengelola menjadi lebih profesional, salam, amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha menghadapi tantangan hidup.
- b) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal didalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat bank.
- c) Mengembangkan kesempatan kerja.
- d) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- e) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

### **4. Pendiri BMT**

BMT dapat didirikan oleh

- a) Sekurang-kurangnya 20 orang
- b) Satu pendiri dnegna yang lainnya tidak memiliki hubungan keluarga vertical dan horizontal satu kali
- c) Sekurang-kurangnya 70% anggota pendiri bertempat tinggal disekitar daerah kerja BMT.

## 5. Permodalan dan Penghimpunan dana (*Funding*) BMT

Sebagaimana diketahui bahwa BMT memiliki dua fungsi utama yakni *funding* atau penghimpunan dana dan *financing* atau pembiayaan, dan kedua fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan ini terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadinya kurangnya dana saat dibutuhkan disisi yang lain.

Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui BMT sesungguhnya tidak terbatas namun BMT harus mampu mengidentifikasi sebagai sumber dana dan mengemasnya ke dalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak. Prinsip simpanan di BMT menganut dua prinsip yaitu :

### a) Prinsip *Wadi'ah*

Yaitu akad penitipan barang atau uang kepada BMT oleh sebab itu BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya saat penitip (*muwadi''*) menghendakinya. Prinsip *wadi'ah* dibagi menjadi dua yaitu pertama, *wadi'ah Amanah* dimana penitipan barang atau uang tidak di dayagunakan oleh BMT namun BMT dapat mensyaratkan adanya jasa kepada penitip sebagai imbalan atas pengamanan, pemeliharaan, dan administrasinya. Nilai jasa tersebut sangat tergantung pada jenis barang dan lamanya penitipan. Kedua, *wadi'ah yad dhamanah* dimana akad penitipan barang atau uang kepada BMT itu dapat memiliki hak untuk mendayagunakan dana tersebut. Atas akad ini deposan akan mendapatkan imbalan berupa bonus yang tentu saja besarnya sangat tergantung dengan kebijakan manajemen BMT.

### b) Prinsip *Mudharabah*

Merupakan prinsip kerjasama modal dari pemilik dana dengan pengelola dana atas dasar bagi hasil. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT. Berbagai ketentuan yang berlaku untuk sistem *mudharabah* meliputi :

- Modal harus diserahkan secara tunai, dinyatakan dalam nominal yang jelas, langsung diserahkan kepada *mudharib* untuk segera memulai usaha.
- Pembagian hasil nisbahnya harus disepakati diawal perjanjian, pembagian hasilnya dapat dilakukan saat *mudharib* telah mengembalikan seluruh modalnya atau sesuai dengan periode tertentu yang disepakati.
- Resiko, bila terjadi kerugian usaha maka semua kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal*, dan *mudharib* tidak akan mendapat keuntungan usaha, untuk memperkecil resiko *shahibul maal* dapat mensyaratkan batasan-batasan tertentu kepada *mudharib*.

Berbagai sumber dana KSPPS BMT NU Sejahtera Semarang menggolongkan simpanan kedalam tiga bentuk simpanan yaitu simpanan pokok khusus, simpanan pokok, dan simpanan wajib, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a) Dana pihak pertama , dana pihak pertama sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian. Tetapi dana ini dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan BMT. Dana pihak pertama dapat dikelompokkan kedalam :

1. Simpanan pokok khusus yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus samam dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat untuk memperbanyak simpanan khusus ini BMT dapat menghubungi para agen maupun lembaga-lembaga islam. Simpanan dapat ditarik setelah jangka waktu satu

tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini penyimpan akan mendapatkan porsi laba/SHU pada setiap akhir tahun secara proposional dengan jumlah modalnya.

2. Simpanan pokok yaitu simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama, pembayarannya dapat diangsur supaya dapat menjangkau jumlah anggota lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, jika simpanan ini ditarik maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.
  3. Simpanan wajib merupakan sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama, baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam SHU. Berbagai sumber permodalan BMT tersebut semuanya sangat penting.
- b) Dana pihak kedua, dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas, artinya tergantung kemampuan masing-masing BMT, dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni bagi hasil, baik bank maupun non bank. Oleh sebab itu, sebaik mungkin BMT hanya mengakses sumber dana yang dikelola secara syariah. Berbagai lembaga yang mungkin dijadikan mitra untuk meraih pembiayaan.
- c) Dana pihak ketiga, merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota BMT, jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara mengembalikannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua, yakni simpanan lancar (Tabungan), dan simpanan tidak lancar (deposito).

- Tabungan adalah simpanan anggota kepada BMT yang dapat diambil sewaktu-waktu, BMT tidak dapat menolak permohonan pengambilan hutang ini.
- Deposito adalah simpanan anggota kepada BMT yang pengambilannya hanya dapat dilakukan saat jatuh tempo. Jenis deposito dapat berkembang menjadi tabungan haji, tabungan qurban, tabungan pendidikan, tabungan berjangka *mudhorobah*. Deposito biasanya memiliki nisbah bagi hasil yang lebih tinggi dibanding tabungan karena deposito merupakan sumber dana yang terkendali. Artinya BMT mengetahui secara pasti jangka waktu mengendapnya dana.

Secara umum sumber dana BMT dapat dikelompokkan berdasarkan rekening di neraca sebagai berikut :

a) Modal sendiri:

- simpanan pokok khusus
- simpanan pokok
- simpanan wajib
- dana cadangan
- hibah
- dana lain yang tidak mengikat dan halal

b) Pembiayaan :

- simpanan umum/tabungan dengan berbagai jenis
- deposito
- obligasi syariah (surat pengakuan hutang bagi hasil)
- pembiayaan dari bank syariah
- pembiayaan dari BMT lain

- pembiayaan dari Puskopsyah (Pusat Koperasi Syariah) dan Inskopsyah (Induk Koperasi Syariah)<sup>42</sup>

## 6. Status BMT

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, posisi BMT sesungguhnya sudah cukup jelas, yakni BMT sebagai LKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Hanyasaja, dalam prakteknya, BMT juga dapat didirikan, dikelola, dan diawasi berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan syarat modal usaha Rp. 65 Juta yang terdiri dari modal primer Rp. 15 juta dan modal sekunder Rp. 50 juta. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Instansi pemerintah pusat yang berwenang adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Perkoperasian.<sup>43</sup>

## 7. Pembiayaan BMT

Sebagai bagian penting dari aktivitas BMT, kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat *performance* lembaga. Hubungan antara hubungan dana dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik sehingga tidak terjadi antara dua kondisi yakni *idle money* dan *illiquid*.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm 150-157.

<sup>43</sup><https://ikosindo.or.id/baitul-maal-wa-tamwil-bmt-lembaga-keuangan-mikro-atau-koperasi/>, diakses tanggal 8 Desember 2018

<sup>44</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm 165.

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* atau transaksi nirlaba.<sup>45</sup> Dimana hakikatnya ini adalah bentuk akad sosial atau akad yang ditujuannya dilakukan dalam mengharap pahala dan keridhaan Allah SWT. Akad *tabarru'* digunakan dalam jenis transaksi yang tidak mengambil keuntungan secara material didalamnya.

Adapun fungsi dari akad *tabarru'* ini selain orientasi akad bertujuan mencari keuntungan akherat bukan untuk keperluan komersil. Karena akad *tabarru'* bisa berfungsi sebagai perantara yang menjembatani dan memperlancar akad tijarah.

a) Transaksi Sosial atau pembiayaan dengan prinsip jasa

- *Qard* adalah pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun dengan adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut.
- *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
- *Hiwalah* merupakan bentuk pemberian pinjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih atau menuntut pembayaran utang.
- *Wakalah* merupakan akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. dapat dilakukan dengan bentuk jasa, keahlian, ketrampilan, atau lainnya yang dilakukan atas nama orang lain.
- *Wadi'ah* merupakan akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang dengan pihak yang dipercaya dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang.

---

<sup>45</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, hlm 66.

- *Kafalah* adalah akad pemberi jaminan suatu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

b) Transaksi Bisnis atau pembiayaan dengan prinsip kerjasama

- *Natural Uncertain Contracts* (NTC)

Adalah akad yang secara alamiah tidak bisa dihitung dengan pasti pendapatan dan bagi hasilnya. Sehingga dalam sifat kontrak seperti ini adalah mustahil ketika hasil pendapatan bulanan akan bisa ditetapkan diawal akad. *Natural Uncertain Contracts* (NTC) adalah akad kerjasama yang meliputi : murabahah, musyarakah, mudharabah.

- *Natural Certain Contracts*(NCC)

Pelaksanaan akad ini merupakan kebalikan dari NTC pada prinsipnya jenis akad ini diturunkan dari teori pertukaran yang tentunya harus sesuai syariat dan jelas. Sehingga dalam peroleh dan pendapatannya jenis transaksi ini bersifat tetap dan baik jumlah, harga maupun waktu penyerahan dan pengembalian. Akad ini meliputi : jual beli, sewa menyewa, dan upah jasa.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm 11

### BAB III

#### PROFIL KSPPS BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA SEMARANG

##### A. Sejarah KSPPS BMT NUS Semarang

Kondisi perekonomian Indonesia, terutama *nahdliyyin* masih memerlukan lembaga keuangan syari'ah yang mampu mengembangkan ekonomi umat utamanya yang berada di level *grass root* (usaha mikro dan kecil). NU sebagai organisasi dengan basis kemasyarakatan yang besar, tersebar merata di seluruh penjuru nusantara dengan struktur organisasi yang tertata dan mengakar kuat. Di dorong oleh kesadaran akan perlunya perbaikan ekonomi umat, dirasakan keberadaan BMT perlu diperluas fungsinya tidak hanya sebagai lembaga sosial saja yang hanya menyalurkan dana-dana zakat, *infaq* dan *shadaqah*, namun juga dana yang dapat ditumbuh kembangkan sebagai modal umat untuk melakukan kegiatan usaha sehingga mampu meningkatkan kondisi ekonomi umat.<sup>47</sup>

Adapun fase perkembangan KSPPS/NU Sejahtera Semarang adalah :

1. Konpercab NU Kota Semarang bulan Juli 2006 mengamanatkan agar pengurus Cabang NU Kota Semarang mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah ( BPRS NU )
2. PC NU terpilih membentuk PC LP NU dengan SK NoPC.11.01/004/SK.03/II/2007
3. PC LP NU Kota Semarang membentuk Koperasi NU Sejahtera ( NUS ),/ KSU NUS
4. Koperasi NU Sejahtera membentuk Unit Usaha Keuangan Syari'ah (BMT NU Sejahtera)
5. Koperasi NU Sejahtera tahun 2014 merubah PAD Nasional dengan nama KSPPS NUS(Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nusa Ummat Sejahtera)

---

<sup>47</sup>Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Abdul Ghafar Ismail, Kartiko A.Wibowo, *BMT: Praktik dan Kasus*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm 4.

Masail diniyah Keputusan Munas Alim Ulama NU, tanggal 15-18 Nopember 1987 menyatakan bahwa Modal yang dikumpulkan oleh KOSIPA dari uang “Simpanan Pokok” dan “Simpanan Wajib” para anggota koperasi dipinjamkan kepada yang memerlukan pinjaman, tidak dapat memenuhi ketentuan syirkah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqih, karena :

- a. Dalam Syirkah pengumpulan modal itu disyaratkan harus ada lafal yang dapat dirasakan sebagai pemberian ijin dalam perdagangan. Sedangkan dalam KOSIPA pengumpulan modal tersebut dimaksudkan untuk dipinjamkan.
- b. Dalam Syirkah modal harus sudah terkumpul sebelum dilakukan syirkah. Sedangkan dalam KOSIPA biasanya modal baru dikumpulkan sesudah disetujui oleh rapat anggota.

Islam telah mempunyai sistem yang lengkap dan merupakan jalan hidup yang sempurna. Islam mengatur setiap persoalan dengan azas agama itu artinya bahwa BMT mampu melaksanakan misi keuangan yang memiliki misi ganda yaitu sosial dan finansial yang keduanya harus dilaksanakan secara seimbang. BMT tidak hanya mengejar keuntungan namun juga mengembangkan aktivitas yang berorientasi pada tujuan-tujuan sosial sehingga dapat memberi sumbangan manfaat kepada masyarakat disekitarnya.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Mas’udi, M.F , *Agama Keadilan Risalah Zakat dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993.

## **B. VISI dan MISI KSPPS/BMT NU Sejahtera Semarang**

KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang memiliki visi yaitu :

VISI : “Menjadi koperasi pemberdayaan ekonomi ummat yang mandiri dengan landasan syari’ah”

untuk mewujudkan visi diatas KSPPS BMT NUS Semarang memiliki 4 poin misi yaitu :

MISI : 1. Menjadi penyelenggaraan layanan keuangan syari’ah yang prima kepada anggota dan mitra usaha.  
 2. Menjadi model pengelolaan keuangan ummat yang efisien, efektif, transparan, dan profesional.  
 3. Mengembangkan jaring kerjasama ekonomi syari’ah.  
 4. Mengembangkan sistem ekonomi ummat yang berkeadilan sesuai syari’ah.<sup>49</sup>

Visi dan misi tersebut wajib dijalankan oleh semua pihak KSPPS BMT NUS Semarang.

## **C. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi dalam KSPPS BMT NUS Semarang sangat diperlukan dalam manajemen yang mengelola organisasi, bagi KSPPS BMT NUS Semarang struktur organisasi mencerminkan pengalokasian tugas, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing jabatan. Manajer yang baik akan menggunakan struktur itu untuk kemudahan ia memberikan pelayanan bukan untuk mempersulit pelayanan, serta memberikan kesejahteraan bagi orang-orang yang ada dalam tanggungjawabnya.

Struktur organisasi biasanya disusun sesuai kebutuhan atau dengan kata lain tergantung pada besar kecilnya kapasitas organisasi untuk mencapai tujuan, teknologi yang digunakan, SDM (karyawan) yang terlibat dalam struktur organisasi, ukuran besar kecilnya organisasi. Sedangkan unsur-unsur struktur organisasi terdiri dari Spesialisasi kegiatan standarisasi kegiatan, koordinasi kegiatan, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan, ukuran satuan kerja.

---

<sup>49</sup>Company KSPPS BMT NUS Semarang, Revisi 2017.

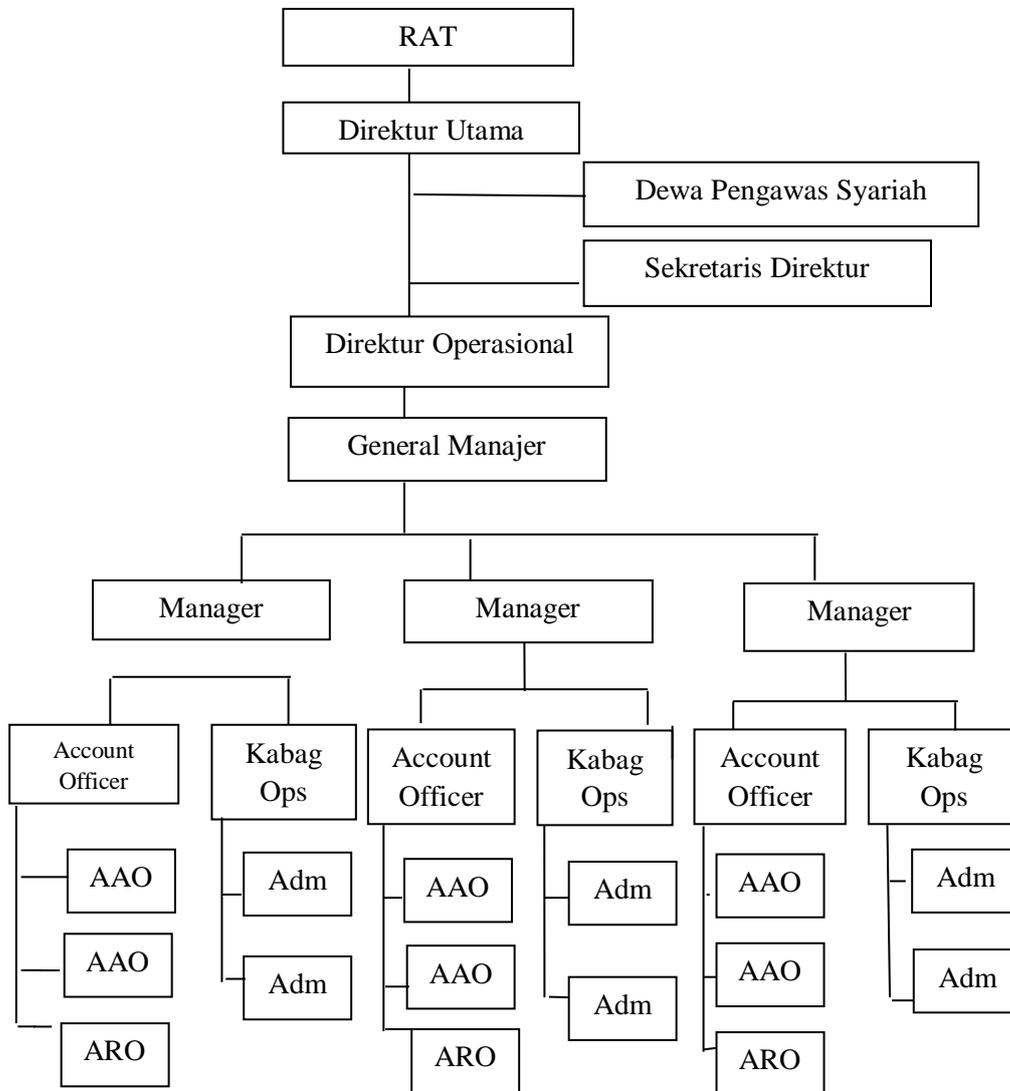
Pengorganisasian adalah cara manajemen merancang struktur formal untuk menggunakan yang paling efektif sumber daya-sumber daya, seperti keuangan, sarana prasarana, fasilitas, bahan baku, dan karyawan (SDM) yang bekerja di organisasi tersebut. Organisasi juga berarti bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegiatannya dan setiap pengelompokan diikuti oleh seorang manajer yang diberi wewenang untuk mengawasi dan membimbing para karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Para manajer membagi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam departemen mereka, dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Adapun prosedur-prosedur dalam proses pengorganisasian adalah :

- Memerinci seluruh pekerjaan organisasi yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan.
- Membagi beban pekerjaan menjadi kegiatan-kegiatan organisasi yang secara logis dapat dilaksanakan oleh tiap karyawan. Pembagian pekerjaan tidak boleh terlalu berat sehingga tidak dapat diselesaikan oleh karyawan yang ditugaskan. Sebaiknya juga tidak boleh terlalu ringan sehingga ada waktu untuk menganggur, sehingga tidak efisien dan terjadi pemborosan (pengeluaran biaya) yang tidak perlu.
- Pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan suatu pekerjaan para karyawan menjadi ketentuan yang terpadu dan harmonis, mekanisme pengkoordinasian ini akan membuat karyawan menjaga perhatiannya pada tujuan organisasi dan mengurangi ketidak efisienan dan konflik-konflik yang merusak<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Ma'ruf Abdullah, *Manajemen berbasis syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012, hlm 181.

Adapun struktur organisasi KSPP BMT NUS :



#### **D. Hukum Syar'i dalam KSPPS BMT NU Sejahtera**

KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang memiliki hukum syar'i yang merujuk pada keputusan muktamar dalam menentukan produk dan jasa keuangannya yang meliputi gadai, zakat, jasa penitipan uang, peminjaman uang, deposito dan cek. Adapun penjelasan yang lebih rinci yaitu,

##### **1. Gadai**

Produk gadai pada KSPPS BMT NUS merujuk pada keputusan Mukhtamar NU ke-2 tahun 1927 M tentang menerima gadai dan manfaatnya dalam masalah ini terdapat tiga pendapat dari para ahli hukum (ulama):

- a. Halal apabila sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut ahli hukum yang terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk syarat dan,
- b. Syubhat jika (tidak tentu jelas halal haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat dan,
- c. Haram dengan sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente).  
Adapun muktamar memutuskan, bahwa yang lebih berhati-hati ialah pendapat yang ketiga (haram).

##### **2. Zakat**

Produk tentang Memberikan Zakat Kepada Salah Seorang Anggota KSPPS BMT NUS Semarang, merujuk pada keputusan Mukhtamar ke-8, 7 Mei 1933 M yang menyatakan "apabila koperasi itu sah, maka boleh zakatnya diberikan kepada salah seorang dari anggota, seperti zakat itu, bilamana si anggota itu termasuk orang yang berhak menerima zakat, karena termasuk salah satu dari delapan yang berhak menerima zakat, atau diberikan seluruhnya zakat kalau tidak terdapat yang berhak menerima zakat dalam tempat itu selain dia"

##### **3. Menitipkan Uang**

Jasa keuangan ini merujuk pada keputusan Mukhtamar ke-12, 25 Maret 1937 M yang menyatakan Tentang Menitipkan uang dalam Bank : Adapun hukumnya bank dan bunganya, itu sama dengan hukumnya dalam putusan Mukhtamar ke-2 seperti dalam gadai apabila halal, syubhat dan haram.

#### 4. Pinjam Uang

Tentang Pinjam dari Koperasi Bahwa pinjam dari koperasi atau lainnya, apabila dijanjikan memberi bunga (rente) dan janjinya itu dalam akad atau sesudah akad tetapi sebelum ada ketetapan pinjam, maka hukumnya haram dengan kesepakatan (mufakat) para ulama, karena itu termasuk pinjaman dengan menarik keuntungan, tetapi kalau tidak dengan perjanjian bicara atau lisan, maka hukumnya boleh dengan tidak selisih antara para ulama, kalau dengan perjanjian dengan tulisan zonder dibaca, atau tentang bunga itu telah menjadi kebiasaan, walaupun tidak dijanjikan, maka hukumnya ada dua pendapat yaitu haram, yang kedua boleh.

#### 5. Deposito

Pada KSPPS BMT NUS Tentang Mendepositokan uang yaitu berdasarkan Keputusan Konggres NU ke-12, ke-2. maka hukum mendepositokan Uang kepada Bank tersebut ada tiga pendapat : haram, halal, syubhat

#### 6. Cek

KSPPS BMT NUS Semarang dalam melakukan Cek merujuk pada Keputusan Mukhtamar ke-27, 8-12 Desember 1984 M tentang Masalah Cek yaitu "Menggunakan cek dalam mu'amalah / tijarah hukumnya boleh. Pembayaran dengan menggunakan cek kosong adalah tidak sah, sebab termasuk tsaman majhul"

### **E. Tujuan KSPPS BMT NU Sejahtera Semarang**

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dimasa depan dengan pernyataan umum yang menjelaskan arah organisasi kemasa depan. Didalam tujuan harus memiliki tujuan operasional yang baik, tujuan operasional adalah hasil yang spesifik dan terukur yang diharapkan dari departemen, kelompok kerja, dan individu (karyawan) dalam organisasi. Kriteria tujuan yang efektif adalah spesifik dan terukur, menyentuh area penting yang memberi kontribusi terbanyak bagi kinerja organisasi, menantang namun realistis untuk menjamin bahwa tujuan berdasarkan sumber daya yang ada dan bukan diluar sumber daya waktu, penalaran atau

keuangan yang dimiliki organisasi, jangka waktu yang jelas, dikaitkan dengan adanya kompensasi.<sup>51</sup>

Adapun tujuan dari KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi ummat berdasarkan prinsip syari'ah yang amanah dan berkeadilan.
2. Mengembangkan ekonomi ummat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berpegang pada prinsip syari'ah.
3. Meningkatkan pengetahuan ummat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur, dan transparan.
4. Meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam kegiatan KSPPS BMT NU Sejahtera.

#### **F. Sarana dan Prasarana KSPPS BMT NU Sejahtera Semarang**

Sarana dan prasarana KSPPS NU Sejahtera memiliki ±34.000 mitra usaha dengan dana kelolaan ±262 Milyar yang selalu berkembang dan memiliki 1 kantor pusat dan 10 kantor cabang dalam Kota Semarang dan 47 kantor cabang luar kota Semarang dan selalu berkembang.

Kantor cabang yang sudah maju operasionalnya meliputi KSPPS BMT NUS Mangkang, Manyaran, Gunungpati, Genuk, Puduk Payung, Klipang, Magelang, Kebumen, Kendal, Boyolali, Ampel Gentansari, Sukoharjo, Gombang, Wonogiri, Parakan, Purwokerto, Wonosobo, Sragen, Sukoharjo II, Gubug, STAINU TMG, Pegandon, Banjarnegara, Majapahit, Sudirman, Kaliwungu, weleri, Gayamsari, Ungaran hal ini didasarkan pada besar luasnya gedung dan dana kelola pada produktifnya anggota pada masing-masing kantor KSPPS BMT NUS.

Kantor cabang yang operasioanalnya masih tahap perkembangan meliputi Banaran, Mijen, Boja, Sumowono, Sragen II, Bawen, Temanggung, Gemolong, Grabag, Sragen III, Sragen IV, Sukorejo, Sragen V, Karanganyar

---

<sup>51</sup>Richard L. Daft, *Management*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm 321.

I, Karanganyar II, Palur I, Palur II, Karanggede, Sragen, Jepara, Rembang, JGrobogan, Pati, Salatiga, Blora, Kutoarjo, Sleman.

### **G. Layanan KSPPS BMT NU Sejahtera Semarang**

Layanan pada KSPPS BMT NUS Semarang yaitu jasa simpanan yang didalamnya terdapat simpanan wadi'ah, pendidikan, berjangka, haji umroh, qurban, zakat infaq shadaqoh. Dan jasa pembiayaan yang meliputi mudharabah dan murabahan, serta terdapat inovasi layanan KSPPS BMT NUS Semarang. Layanan ini atas dasar literasi keuangan anggota KSPPS BMT NUS Semarang. Adapun rincian layanan pada KSPPS BMT NUS Semarang adalah :

#### **1. Jasa Simpanan yang meliputi :**

##### **a. Simpanan Wadi'ah**

Simpanan ini bersifat harian dengan setoran awal hanya Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) dan dana dapat disetor-ambil tiap hari.

##### **b. Simpanan Pendidikan**

Simpanan ini adalah simpanan harian khusus pelajar sekolah dengan setoran awal hanya Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) dan dapat disetor-ambil tiap hari. Simpanan ini bertujuan agar siswa memiliki tabungan untuk kebutuhan pendidikannya dan tidak mengalami putus sekolah karna tidak memiliki biaya.

##### **c. Simpanan Berjangka**

Merupakan simpanan berjangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan nilai simpanan mulai dari Rp.1.000.000; (satu juta rupiah) dan tingkat bagi hasil yang sangat menguntungkan. Ditujukan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dalam jangka waktu tertentu.

##### **d. Simpanan Umroh dan Haji**

Simpanan ini ditujukan khusus bagi umat yang ingin menunaikan ibadah umroh dan haji dengan setoran awal mulai dari Rp.1.000.000; (satu juta rupiah). Dapat melakukan setoran setiap hari.

##### **e. Simpanan Pelunasan Haji**

Simpanan ini dikhususkan bagi calon haji untuk digunakan dalam pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dengan setoran awal mulai dari

Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah).Sampai dengan sejumlah dana pelunasan yang besarnya ditentukan pemerintah.

f. Simpanan Qurban atau Hari Raya

Simpanan ini dikhususkan bagi mitra yang hendak menunaikan ibadah qurban atau menyiapkan keperluan untuk Hari Raya dengan setoran awal mulai dari Rp.100.000, Setoran dapat dilakukan setiap hari tanpa dibatasi sedangkan pengambilan dapat dilakukan pada saat akan menunaikan ibadah qurban atau menyiapkan keperluan hari raya.

g. Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Merupakan salah satu bentuk layanan sosial KSPPS BMT NU Sejahtera untuk mengelola dan menyalurkan dana ZIS umat.

2. Jasa Pembiayaan didalam KSPPS BMT NUS meliputi mudharabah dan murabahah disediakan untuk anggota sebagai jembatan menuju kemandirian perekonomian umat , adapun penjelasanya yaitu :

a. Mudharabah (Investasi) berupa tambahan modal kerja bagi pengembangan usaha mitra KSPPS BMT NU Sejahtera.Keuntungan (hasil usaha) yang diperoleh dari tambahan modal kerja akan dibagi antara KSPPS BMT NU Sejahtera dan mitra usaha berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui.

Mudharabah yaitu kerjasama usaha antara pihak BMT dengan anggota yang seluruh modalnya dari pihak BMT, nisbah bagi hasil akan disepakati bersama kedua belah pihak. Transaksi mudharabah dapat berlaku pada dua kegiatan :

- Mudharabah Mutlaqah (bebas), yaitu kerjasama usaha dengan pilihan diberikan keleluasan kepada anggota untuk menentukan jenis usaha yang layak tanpa ada batasan khusus.
- Mudharabah Muqayyadhah (bersyarat), yaitu kerjasama usaha tapi pihak BMT memberikan batasan tertentu terhadap usaha yang akan dikelola mudharib atau anggota seperti misalnya jenis usaha, lokasi, daerah distribusi, dan lain-lain.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitu Mal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm 180.

b. Murabahah yang didasarkan pada asas jual-beli, dengan KSPPS BMT NU Sejahtera bertindak sebagai penjual dan mitra usaha sebagai pembeli. Harga jual ditentukan berdasarkan harga beli dasar ditambah *mark-up* sesuai (keuntungan) dengan kesepakatan antara KSPPS BMT NU Sejahtera dengan mitra usaha.

### 3. Inovasi Layanan pada KSPPS/BMT NU Sejahtera Semarang

Layanan yang ditawarkan dan disediakan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera akan selalu dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan mitra usaha. Antara lain

- a. Loket Pembayaran Tagihan yang disediakan bagi seluruh masyarakat demi kemudahan dalam pembayaran tagihan PLN, Telkom, dan pembelian pulsa telepon seluler.
- b. Transfer Antar Bank yang disediakan bagi mitra usaha yang membutuhkan pemindahan dana dari KSPPS BMT NU Sejahtera ke berbagai bank baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Seluruh fasilitas yang ditawarkan dan disediakan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat demi kemudahan dan kenyamanan Anggota. Seluruh staff dan karyawan (Pengelola) KSPPS BMT NU Sejahtera selalu siap melayani dan membantu mitra usaha dengan sepenuh hati.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Kspps Bmt 'Nu Sejahtera' Kota Semarang, *Company Profile*, 2017.

## **BAB IV**

### **PERAN KSPPS BMT NU SEJAHTERA SEMARANG DALAM MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN**

#### **A. PERAN KSPPS BMT NUS SEMARANG**

##### **1. Pendidik (Edukasi) Literasi Keuangan kepada Anggota KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang**

KSPPS BMT NUS Semarang berdasarkan legalitas BPRS NU (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dengan SK No: PC.11.01/004/SK.03/II/2007 bahwa Koperasi NU Sejahtera tahun 2014 merubah PAD Nasional dengan nama KSPPS NUS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nusa Ummat Sejahtera) merupakan lembaga keuangan dibawah naungan NU (Nahdatul Ulama) ialah organisasi dengan basis kemasyarakatan yang besar, tersebar merata di seluruh Indonesia, untuk mengetahui peran KSPPS BMT NUS Semarang dalam meningkatkan literasi keuangan berkesinambungan dengan kegiatan terfokus pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan memberi pengawasan serta edukasi kepada anggota KSPPS BMT NUS sehingga tercipta literasi keuangan yang baik. Peran KSPPS BMT NUS dalam meningkatkan literasi keuangan anggota berpedoman pada tujuan KSPPS NUS yaitu : “Mengembangkan ekonomi ummat dalam bentuk usaha mikrokecil dan menengah dengan berpegang pada prinsip syari’ah dan meningkatkan pengetahuan ummat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur, dan transparan.” Dalam mewujudkan literasi keuangan yang baik bagi anggota KSPPS BMT NUS yang berjumlah ±600 anggotayang sebagian besar terfokus pada usaha mikro kecil menengah, peran dalam peningkatan literasi keuangan yaitu Berperan sebagai pendidik literasi keuangan bagi anggotaKSPPS BMT NU Sejahtera Semarang

Edukasi didalam KSPPS BMT NU Sejahtera Semarang dilaksanakan melalui edukasi anggota yang bergerak dalam bidang UMKM, Pembiayaan menjadi pertimbangan dalam melakukan jenis usaha mikro yang akan dijalani. Program edukasi KSPPS BMT NU Sejahtera Semarang dilakukan melalui edukasi perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. Perencanaan disini meliputi

pertimbangan resiko. Pengorganisasian menyangkut proses usaha mikro yang dijalani termasuk bagaimana merealisasikan dana pembiayaan. Serta pengendalian yang menyangkut proses keputusan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan oleh KSPPS BMT NUS kepada anggotanya. Sosialisasi dan edukasi berguna untuk meningkatkan pemahaman produk dan jasa keuangan KSPPS BMT NUS Semarang. Hal yang paling diutamakan dalam meningkatkan literasi keuangan bagi KSPPS BMT NUS adalah dilakukan edukasi risiko yang meliputi :

➤ Edukasi risiko pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko yang muncul akibat kelalaian dan kegagalan tagihan pembayaran dari anggota.<sup>54</sup> Edukasi ini dilakukan dengan dibentuknya program wajib nabung, didalam KSPPS BMT NUS mewajibkan setiap anggota yang bergerak disektor UMKM memiliki tabungan atau kepemilikan dana melalui akad wadi'ah, dana ini diperuntukan agar meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan. Tabungan dengan akad wadi'ah yaitu anggota menyimpan dana berupa simpanan wadi'ah dimana anggota diharuskan menyetor simpanan harian dengan setoran awal hanya Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) dana dapat disetor dan diambil tiap hari, pembiayaan yang telah diberikan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera Semarang dapat dikelola dengan baik yang akan meningkatkan literasi keuangan anggota.

➤ Edukasi risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat dari kegagalan proses internal, manusia, sistem, atau dari kejadian internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan.<sup>55</sup> Risiko ini dekat dengan kesalahan manusiawi dimana terjadi gangguan bisnis dan mengakibatkan kegagalan usaha mikro anggota KSPPS BMT NUS. Pada dasarnya anggota yang mengajukan pembiayaan untuk usaha mikro memiliki tujuan memaksimalkan laba artinya setiap usaha yang dibuka berkeinginan memperoleh laba maksimal. Dalam mewujudkan hal tersebut harus didukung oleh dana yang cukup dan dengan pengendalian operasional yang baik. Untuk

---

<sup>54</sup>Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016

<sup>55</sup>Mahmud Hanafi, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006, hlm 206.

meminimalisir risiko operasional demi meningkatkan literasi keuangan anggota, KSPPS BMT NUS menyediakan layanan bimbingan usaha mikro kecil menengah yang berfokus pada pemberian forum diskusi pengelolaan keuangan yang baik yang dapat membuat anggota KSPPS BMT NUS menjadi *well literate finance*.

➤ Edukasi risiko strategi

Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi dalam usaha mikro yang tidak tepat oleh anggota. Setelah adanya upaya dalam mengurangi risiko operasional usaha mikro bagi anggota maka diperlukan pengendalian risiko strategi dalam mengatur bagaimana cara memajukan usaha mikro yang telah didirikan agar anggota dapat mandiri dalam perekonomiannya. KSPPS BMT NUS dalam hal ini KSPPS BMT NUS melakukan pengawasan atas jalannya usaha mikro dengan pembuktian tidak terjadi pembiayaan bermasalah pada setiap anggotanya.

Dengan adanya edukasi resiko tersebut kepada anggota KSPPS BMT NUS Semarang tidak lain untuk meningkatkan pemahaman penggunaan produk dan jasa keuangan yang baik dan benar.

## **2. Penyedia Sarana dan Prasarana Literasi Keuangan Anggota KSPPS BMT NUS Semarang**

KSPPS BMT NUS pada setiap periode selalu mengembangkan infrastruktur dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung literasi keuangan hal ini dilakukan dengan menyelenggarakan pengawasan untuk mengetahui perkembangan literasi keuangan anggotanya. Dalam memperkuat infrastruktur KSPPS BMT NUS bekerjasama dengan berbagai pihak diantaranya adalah melalui ranting-ranting NU yang ada di seluruh Indonesia untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, website resmi pemberdaya ekonomi NU , MoU, dan pada setiap agen yang bertugas dilapangan, infrastruktur tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya kantor cabang KSPPS BMT NUS di penjuru Indonesia guna menjangkau dan melayani masyarakat di daerah terpencil.

MoU yang dilakukan KSPPS BMT NUS dengan berbagai pihak diantara lain dengan lembaga pendidikan perguruan tinggi, dimana KSPPS BMT NUS membuka

lebar kesempatan mahasiswa dalam mempelajari pengelolaan keuangan di dalam KSPPS BMT NUS yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kerjasama dibidang pendidikan. Selain itu KSPPS BMT NUS bekerjasama dengan sekolah-sekolah dengan memberi materi tentang sosialisasi literasi keuangan di Indonesia dengan melakukan simulasi produk jasa dan tentunya dapat di sebarluaskan kepada seluruh lapisan masyarakat. Media sosial yang digunakan KSPPS BMT NUS adalah website resmi dari organisasi BPRS NU , yaitu BPRSNU.go.id atau bisa kunjungi ksppsbmtnus.ac.id guna memberi pengetahuan pentingnya pengelolaan keuangan dengan baik sehingga setiap golongan masyarakat dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan dan perkembangan KSPPS BMT NUS dalam beberapa periode.

Prasarana KSPPS BMT NUS dengan berupa seluruh fasilitas yang ditawarkan dan disediakan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat demi kemudahan dan kenyamanan Anggota, dengan dimilikinya ±34.000 mitra usaha dengan dana kelolaan ± 262 Milyar ( Selalu berkembang ). Memiliki 1 kantor pusat dan 10 kantor cabang dalam Kota Semarang dan 47 kantor cabang luar kota Semarang yang selalu berkembang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada program memperkokoh infrastruktur perlu dilakukan peningkatan dalam program kerjasama dengan berbagai pihak guna mendukung terciptanya literasi keuangan yang lebih efektif dan efisien yang optimal dan berkesinambungan mengingat bahwa kantor cabang KSPPS BMT NUS yang sudah banyak baik di Semarang maupun luar kota.

### **3. Penyedia Produk dan Jasa Untuk Literasi Keuangan Anggota KSPPS BMT NUS Semarang**

Layanan pada KSPPS BMT NUS berupa jasa Simpanan, jasa Pembiayaan , KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), dan dana talangan haji. Sebagai bentuk pengembangan produk jasa keuangan KSPPS BMT NUS dibentuk kebijakan intern bagi anggota yaitu program wajib nabung, program tersebut ditujukan untuk membantu anggota yang khususnya bergerak di bidang usaha kecil atau pedagang kecil agar tidak terjerat rentenir, dalam program wajib nabung ini anggota bisa

mendapat pembiayaan hingga tiga juta tanpa agunan dan langsung cair dan bagi hasil sesuai kesepakatan. KSPPS BMT NUS Semarang adalah lembaga keuangan yang berupaya dalam memajukan keuangan para pedagang kecil dan menanamkan sifat dari LKM (Lembaga Keuangan Kecil) yaitu lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan mendorong usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat mengingat jumlah pembiayaan kepada masyarakat yang relatif kecil.

Simpanan pendidikan pun mengalami perkembangan yaitu KSPPS BMT NUS membuka program simpanan pendidikan untuk segala tingkat sekolah. Hal ini dilakukan dengan tujuan bahwa pendidikan yang baik didasari oleh modal keuangan yang baik pula karena pemerintah tidak memberikan beasiswa kepada semua golongan masyarakat hanya yang terseleksi yang menerimanya, maka KSPPS BMT NUS membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyisihkan uangnya dan ditabung di KSPPS BMT NUS.

Tindakan yang dilakukan pihak KSPPS BMT NUS dalam memperlancar pengembangan produk ini adalah dengan dilakukannya sosialisasi dan survei lapangan ke berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Mengembangkan dan memasarkan produk sertajasa keuangan pada KSPPS BMT NUS sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu yang dilakukan oleh KSPPS BMT NUS Semarang adalah dengan diluncurkannya inovasi layanan di antara lain layanan loket pembayaran tagihan, dan layanan transfer antar bank. Layanan inovasi ini dilatar belakangi keluhan masyarakat saat dilakukannya sosialisasi dan survei jalannya operasional UMKM anggota oleh KSPPS BMT NUS bahwa masyarakat enggan membayar tagihan seperti tagihan PLN, Telkom, dan pembelian pulsa telepon seluler yang sering terjadi antrian panjang hingga memakan waktu lama. Jika masyarakat acuh dengan hal seperti ini maka akan berdampak pada literasi keuangan. Secara umum berdasarkan penelitian produk yang dilakukan KSPPS BMT NUS Semarang sudah tepat dimana pengembangan produk tersebut dapat menyentuh kepada masyarakat kecil, namun perlu ditingkatkan dalam pengembangan produk yaitu menciptakan aksestabilitas produk agar lebih dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan lebih mudah diperoleh masyarakat.

Kedepannya KSPPS BMT NUS berencana untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan segmen pensiunan, nelayan, dan profesi lainnya. Diantaranya adalah memberi pelatihan dan pengawasan di beberapa UMKM kabupaten, memberi strategi pengelolaan yang baik kepada masyarakat nelayan, masyarakat desa, agar terciptanya dampak negatif dari kreditur informal yang penuh riba dan terciptanya inklusi keuangan yang bergerak dibawah naungan BPRS NU.<sup>56</sup>

## **B. Optimalisasi Peran KSPPS BMT NUS Semarang dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Anggota**

Untuk mengetahui peran KSPPS BMT NUS Semarang dalam meningkatkan literasi keuangan anggotanya dilakukan wawancara dengan manajer KSPPS BMT NUS Semarang selaku narasumber utama. Hasil wawancara yaitu KSPPS memiliki peran sebagai pendidik, penyedia sarana prasarana, dan penyedia produk jasa keuangan untuk literasi keuangan anggota.

- Optimalisasi sosialisasi dan pengawasan dengan berbagai program peningkatan literasi keuangan

Optimalisasi dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi mengenai pengendalian risiko untuk meningkatkan literasi keuangan anggota, KSPPS BMT NUS telah melaksanakan beberapa program yaitu program wajib menyimpan dan beberapa dana dengan akad wadiah bagi anggota yang menerima pembiayaan guna meminimalisir risiko kredit, kebijakan dibuka forum diskusi untuk memberi saran kepada anggota yang ingin berkonsultasi tentang bagaimana mengelola usaha mikronya agar menjadi mandiri guna meminimalisir risiko operasional, sosialisasi tentang strategi mengembangkan bisnis kecil oleh KSPPS BMT NUS kepada anggotanya supaya usaha mikro yang dijalani dapat terhindar dari risiko strategi yang tidak tepat.

Sosialisasi yang dilakukan KSPPS BMT NUS tidak hanya kepada masyarakat UMKM namun juga pada para intelektual di Indonesia. Seperti siswa, mahasiswa, pondok pesantren, pendidik, dan PNS. Adapun sarana dalam meningkatkan literasi keuangan anggota dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti : membentuk tim

---

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Kholidin, selaku Manajer KSPPS BMT NUS Semarang, Tanggal 9 oktober 2018, pukul 14.00 WIB.

khusus(*fleksibel*) yang tugasnya memantau anggota yang berada dilapangan, seminar, sosialisasi kepada anggota pelaku UMKM dan para intelektual baik di sekolah formal, informal, perguruan tinggi dan pondok pesantren. Edukasi pengendalian risiko ini dilakukan dengan maksud supaya terwujudnya tujuan dari KSPPS BMT NUS yaitu menjadikan anggotanya mandiri dalam perekonomian dan meleak akan perekonomian yang akan berpengaruh pada meningkatnya literasi keuangan anggota. Edukasi dan sosialisasi literasi keuangan untuk anggota dilakukan dengan dua cara yaitu :

b. Melalui media sosial

Sosialisasi melalui media sosial dan elektronik. Adapun media elektronik dilakukan melalui radio lokal dan media sosial dilakukan dengan *website* resmi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh KSPPS BMT NUS dapat di saksikan dan di dengar oleh setiap lapisan masyarakat. Salah satu kegiatan yang termuat dalam media sosial adalah kegiatan silaturahmi dan diskusi pengelolaan keuangan dengan KSPPS NU Jawa Timur, seminar di pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Salah satu bentuk sinergi antar KSPPS NU dalam meningkatkan nilai manfaat, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

b. Secara langsung

Sosialisasi secara langsung melalui dua sistem yaitu sosialisasi dilakukan oleh staf karyawan KSPPS BMT NUS yang bersifat *fleksibel* kepada anggota melalui kegiatan kemasyarakatan, dan yang kedua anggota yang datang ke kantor KSPPS BMT NUS untuk berkonsultasi secara langsung.

Tujuan literasi keuangan adalah meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan keuangan dan mengubah sikap perilaku dalam mengelola keuangan menjadi lebih baik sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuanagn yang sesuai dengan kebutuhan.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>RPOJK Literasi dan inklusi keuangan, BAB II, Pasal 2 dan 3.

KSPPS BMT NUS memang tidak berhubungan langsung dengan Otoritas Jasa Keuangan namun KSPPS BMT dibawah naungan BPRS NU yang berhubungan dengan OJK dalam melaksanakan kebijakan. KSPPS BMT NUS Semarang dalam melakukan peningkatan literasi keuangan dengan berkoordinasi antar instansi dan pimpinan supaya percepatan akses keuangan di kalangan masyarakat kecil mengalami pertumbuhan ekonomi dan sejahtera.

Program literasi keuangan mendorong adanya ketersediaan akses keuangan kepada masyarakat untuk mendukung masyarakat daerah mengingat bahwa APBN memiliki prosentase besar yang disalurkan kepada setiap BumDes (Badan Usaha Milik Desa). Selain itu, KSPPS BMT NUS mengupayakan peran lembaga keuangan ini dapat memberi peran serta dalam pembangunan perekonomian desa dan menggali potensi ekonomi daerah yang tentunya dapat dikembangkan melalui penggunaan produk dan layanan jasa keuangan di KSPPS BMT NUS.

- Sinergi literasi keuangan anggota KSPPS BMT NUS

Sinergi program adalah suatu kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak dengan tujuan program literasi keuangan dapat dilaksanakan lebih optimal dan menimbulkan citra yang baik. Saat ini KSPPS BMT NUS Semarang sudah melaksanakan program yang bekerjasama dengan berbagai pihak diantaranya :

- a) Melaksanakan silaturahmi dengan KSPPS BMT NU di Jawa Timur, perhelatan yang bertajuk ekonomi sejahtera : menuju masyarakat cerdas keuangan. Kegiatan didalamnya adalah diskusi sebagai strategi peningkatan pengetahuan pengelolaan keuangan untuk anggota dan masyarakat yang berimbas pada meningkatnya literasi keuangan anggota.
- b) Sosialisasi dengan pondok pesantren yang bergerak dalam naungan NU, dengan tema memperbaiki pengelolaan keuangan melalui koperasi syariah. Sosialisasi ini dilakukan di pondok pesantren yang memiliki program kewirausahaan santri.
- c) Sosialisasi kepada mahasiswa/pelajar, KSPPS BMT NUS melakukan kegiatan dengan diadakannya seminar terbuka di kantor KSPPS BMT NUS untuk kalangan mahasiswa dan pelajar.

- d) Sosialisasi dengan masyarakat pedesaan yang dilakukan dengan tim marketing KSPPS BMT NUS, kegiatan ini biasa dihadiri oleh warga dan lurah serta perangkat desa.

Kegiatan kerjasama tersebut dijalankan secara bertahap dalam waktu satu periode yang menjadikan KSPPS BMT NUS menjadi eksis dimata masyarakat dan dapat dikatakan optimal. Pengaruh bagi masyarakat adalah masyarakat menjadi lebih mengenal berbagai macam produk dan jasa KSPPS BMT NUS yang ditawarkan dan dengan hal tersebut masyarakat dapat meningkatkan literasi keuangannya.<sup>58</sup>

Hal yang mendasari peningkatan literasi keuangan adalah proses mengenal calon nasabah atau anggota. adapun tujuan pengenalan calon nasabah atau anggota adalah untuk mengenal profit dan karakteristik transaksi sehingga secara dini lembaga keuangan dapat berhati-hati dalam memberikan dana. Melalui pengenalan calon anggota KSPPS/BMT maka akan diketahui profil keuangannya yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini perlu adanya pengawasan, kebijakan, sumberdaya manusia, pelatihan, sistem informasi dan pengendalian intern. Pengenalan nasabah atau anggota secara teknis telah dikeluarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KMK.06/2003 tentang penerapan pengenalan nasabah atau anggota bagi lembaga keuangan *non bank* dan beberapa keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan.

Pengenalan anggota yang diterapkan dalam lembaga keuangan *non bank* bertujuan untuk mengetahui identitas anggota atau nasabah dan memantau kegiatan transaksi dan proses pengelolaan dana yang diterima oleh nasabah atau anggota. Sementara transaksi mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik, serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah atau anggota yang bersangkutan. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa lembaga keuangan non bank, termasuk namun tidak terbatas pada data anggota berupa identitas diri, pekerjaan, tujuan penggunaan dana dan dokumen pendukung. Disamping itu data dimaksud untuk melengkapi dengan dokumen pendukung. Setelah itu pihak lembaga keuangan *non*

---

<sup>58</sup>Hasil Wawancara dengan Manajer KSPPS BMT NUS Semarang, Tanggal 12 oktober 2018 pukul 09.20 WIB

*bank* harus meneliti dokumen terkait misalnya dengan melakukan wawancara. Apabila data yang diminta oleh lembaga keuangan *non bank* tidak terpenuhi maka pihak lembaga keuangan *non bank* tidak diperkenankan melakukan perikatan dengan pihak nasabah atau anggota tersebut.

Kemudian setelah anggota diterima maka pihak lembaga keuangan berkewajiban untuk menyimpan dokumen sampai dengan lima tahun setelah perikatan berakhir, merevisi data bila ada perubahan, serta memelihara profil anggota, dan memantau jalannya perekonomian anggota dalam pengelolaan dananya. Informasi mengenai anggota atau nasabah perlu digali secara mendalam oleh lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan syariah. Hal ini bertujuan agar dana tidak dimanfaatkan secara menyimpang seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan pencucian uang dengan tujuan tersebut akan tercipta sebuah penumbuhan literasi keuangan yang baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan manajer KSPPS BMT NUS Semarang dalam rangka mewujudkan literasi keuangan anggota yang baik KSPPS BMT NusaUmmat Sejahtera Semarang berperan sebagai:

a) Berperan sebagai pendidik literasi keuangan bagi anggota

KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang memberi edukasi dan sosialisasi literasi keuangan kepada anggota, dimana pada KSPPS BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang melaksanakannya dengan memberi edukasi kepada anggota berupa pengendalian dan pengawasan terhadap risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko strategi kepada anggota yang bergerak di sektor usaha mikro kecil menengah yang ditunjang dengan program inisiatif yaitu:

- Program wajib nabung, program tersebut diperuntukan bagi anggota yang bergerak dalam UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)
- Program forum diskusi dan edukasi pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan dua sistem yaitu pertama, dari pihak KSPPS menyurvei langsung kelengkapan dan kedua, pihak anggota yang datang langsung ke kantor KSPPS BMT NUS Semarang.
- Program pengawasan setiap seminggu sekali oleh pihak KSPPS BMT NUS terhadap anggota dan masyarakat bidang UMKM dalam mengelola usaha dan menentukan strategi yang tepat dalam mengelola usaha yang dijalankan oleh anggota.

b) Berperan sebagai penyedia sarana dan prasarana literasi keuangan anggota

Sarana dan prasarana dilakukan dengan memperkuat infrastruktur KSPPS BMT NUS Semarang

- Menyusun program inisiatif yaitu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti desa-desa, KSPPS NUS di jawa timur, lembaga pendidikan, pondok pesantren, ranting-ranting NU seluruh Indonesia. Kerjasama ini dilakukan guna

mendukung pelaksanaan program peningkatan literasi keuangan anggota dan masyarakat.

- Mengembangkan jaringan internet yang dapat membantu masyarakat mengetahui arti literasi dan keinklusifan keuangan.
- Membuka kantor cabang di penjuru desa terpencil, fasilitas yang ditawarkan dan disediakan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat demi kemudahan dan kenyamanan anggota, dengan dimilikinya ±34.000 mitra usaha dengan dana kelolaan ±262 Milyar (Selaluberkembang). Memiliki 1 kantor pusat dan 10 kantor cabang dalam Kota Semarang dan 47 kantor cabang luar kota Semarang yang selalu berkembang.

c) Berperan sebagai penyedia produk dan jasa untuk literasi keuangan anggota

Program yang diciptakan KSPPS BMT NUS untuk meningkatkan literasi keuangan dilakukan dengan mengembangkan produk dan layanan jasa keuangan KSPPS BMT NUS Semarang dengan melalui :

- Program wajib nabung
- Program pendidikan
- Inovasi layanan berupalayanan loket pembayaran tagihan dan loket transfer antar bank
- Memperluas aksestabilitas produk dan jasa keuangan agar mudah diperoleh masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Dengan pengembangan produk dan jasa keuangan tersebut pihak KSPPS BMT NUS akan melakukan tahap pemasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tidak hanya terfokus pada sektor UMKM namun juga akan menyentuh sektor nelayan, PNS , dan buruh pabrik supaya produk dan jasa keuangan dapat berkembang lagi dan mendorong terciptanya produk dan jasa keuangan yang terjangkau oleh masyarakat umum.

Peran KSPPS BMT NUS Semarang tersebut berpedoman pada tujuan utama KSPPS BMT NUS Semarang yaitu mengembangkan ekonomi umat dalam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berpegang pada prinsip syari'ah dan meningkatkan pengetahuan umat dalam pengelolaan keuangan yang bersih, jujur, dan transparan tentunya tidak hanya dengan strategi saja namun ada faktor pendukung yang dilakukan KSPPS BMT NUS diantaranya : sosialisasi, pelatihan, kunjungan, dan diskusi.

Optimalisasi dilakukan dengan edukasi dan sosialisasi mengenai pengendalian risiko untuk meningkatkan literasi keuangan anggota, KSPPS BMT NUS telah melaksanakan beberapa program. Dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui media sosial dan bekerjasama dengan pihak lain seperti pondok pesantren, Mahasiswa atau pelajar, KSPPS yang lain, dan masyarakat pedesaan.

Dengan adanya literasi keuangan ini anggota KSPPS BMT NUS dapat meningkatkan pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga keuangan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan, dan bagi pihak KSPPS BMT NUS member keuntungan tersendiri seperti meningkatnya citra perusahaan, menurunnya masalah pembiayaan anggota dan infrastruktur serta produk menjadi lebih berkembang.

## **B. Saran/Rekomendasi**

Setelah melaksanakan penelitian di KSPPS BMT NUS di Semarang tentang peran KSPPS BMT NUS dalam meningkatkan literasi keuangan anggota. Penulis memiliki beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya proses literasi keuangan terhadap anggota dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa BMT memiliki dua fungsi utama yakni *funding* atau penghimpunan dana dan *financing* atau pembiayaan, dan kedua fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan ini terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadinya kurangnya dana saat dibutuhkan disisi yang lain. Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui BMT sesungguhnya tidak

terbatas namun BMT harus mampu mengidentifikasi sebagai sumber dana dan mengemasnya ke dalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak.

Secara keseluruhan program peningkatan literasi keuangan yang dilakukan KSPPS BMT NUS sudah baik. Namun, menurut pengamatan penulis, pelaksanaan program ini perlu ditingkatkan khususnya pada pengawasan pengendalian risiko sehingga pemahaman akan tingkat literasi keuangan dapat menyeluruh dan merata disegala aspek. Tidak hanya terfokus pada sektor UMKM namun juga pada semua sektor. Adapun beberapa hal yang menjadikan masukan penulisan antara lain :

1. Mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan mutu kualitas peningkatan literasi keuangan terhap anggota dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan keyakinan lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan khususnya KSPPS BMT NUS Semarang.
2. Pengawasan dan pengendalian terhadap anggota atas pengelolaan dana perlu di arsipkan agar suatu saat bias dijadikan acuan dalam pembuatan strategi baru untuk peningkatan literasi keuangan anggota.
3. Memperluas akses tidak hanya berisikan kegiatan KSPPS BMT NUS, namun juga akses pendaftaran online dan forum diskusi online guna meningkatkan kemotivasian masyarakat dalam sadar literasi keuangan. Karena pada dasarnya literasi keuangan yang baik akan berdampak pada kesejahteraan perekonomian.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, Lusardi & Mitchell, O.S, *BabyBoomer Retirement Security: The Roles of Planning, Financial Literacy, and Housing Wealth*, *Journal of Monetary Economics*, 2007, hlm.205.
- A, Karvof. *Cara Cerdas Meraih Kekayaan dan Keberkatan Finansial*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2010.
- Abdullah, Ma'ruf. *Manajemen berbasis syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012
- Ade Nursiyono, Joko. *Kompas Teknik Pengambilan Sampel*, Bogor: In Media, 2014
- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. Cet I*, Jakarta : Pustaka Amani, 1997)
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002
- Darmawi, Herman. *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016
- Garlans Sina, Peter. "Analisis Literasi Ekonomi", *Jurnal Economia*, 2012
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004
- Hafidhuddin, Didin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2003
- Hanafi, Mahmud. *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006
- Hartono, *Nasibmu di Dompotmu*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2012
- Hidayat, Amin. "Peran OJK dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan", 2017.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta : Walhi, 2003.
- <https://semarangkota.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.htm> (diakses tanggal 5 maret 2018)
- Kspps Bmt 'Nu Sejahtera' Kota Semarang, *Company Profile*, 2017.
- KSPPS NUS Semarang, *Company profile revisi*, 2017

- Mas'udi, M.F , *Agama Keadilan Risalah Zakat dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993.
- Nizamuddin, “*Peran Tokoh Masyarakat Dalam Pengamalan Ibadah Bagi Masyarakat Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar*”, 2016.
- Novi Yushita, Amanita. ”*pentingnya literasi keuangan Bagi pengelola keuangan pribadi*”, Jurnal nominal, volume vi nomor 1, 2017.
- OJK “*Peran Strategis Ojk Dalam Mengembangkan Literasi Keuangan Yang inovatif*”, 2016.
- OJK, *Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia dan Inklusi Keuangan*, 2016.
- OJK, [www.OJK.go.id](http://www.OJK.go.id), (diakses pada tanggal 20 september 2018, Pukul 10.27 WIB)
- Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan (Revisit)*, 2017.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /Pojk.07/2016 Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan/Atau Masyarakat.
- peraturan Perundang-undangan RI /No.25/1992/*Hukum Koperasi*.
- Richard L. Daft, *Management*, Jakarta: Salemba Empat, 2007
- Rusmana Lilis Ardiant , Oman..“*Analisis perbedaan literasi keuangan masyarakat anggotacreditunion dengan anggota baitut tamwil* ”, 2013.
- Setiawati, Rike .“*Literasi Keuangan Islam (suatu Telaah Literatur)*”,*Journal ecnomia* 2015.
- Sugiono, *Cara Mudah Menyusun SKRIPSI, TESIS, dan DISERTASI*, Bandung : Alfabeta, 2016
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2011.
- Sujarweni, Wiratna . *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: PT.Pustaka Baru Press, 2015
- Sujarweni, V. Wiratna . *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015
- T. Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2003
- Tim Penyusun KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Jakarta: Balai Pustaka, 2016

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang, 2010

Widayati, Irin. “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*”, *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 2012.

Wahid, Naron. *Membongkar Hegemoni Keuangan*, Jakarta : Gramedia , 2014

Wirawan , Sarlito Sarwono. *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

# **LAMPIRAN-** **LAMPIRAN**

**Daftar Sarana dan Prasarana KSPPS BMT NUS :**

- 1) KP Mangkang, Jl. Raya Semarang Kendal KM. 15 No.99.
- 2) Mangkang Semarang. Telp (024) 8660212 Fax.(024) 8666028Email: [bmt\\_nus@yahoo.co.id](mailto:bmt_nus@yahoo.co.id).
- 3) KC Manyaran, Ruko Manyaran Blok 1 Jl.Abdurrahman Saleh 308 Semarang. Telp (024) 76634260, Fax (024) 76634174.
- 2) kc. Gunungpati, Jl. Manyaran-Gunungpati KM.10 Semarang  
Telp. (024)6932200.
- 3) KC. Genuk, Jl. Dong Biru Raya Ruko No. 5 Genuksari RT. 03/03 Genuk Semarang.  
Telp. (024)6582790 Fax.(024) 6582760.
- 4) KC. Pudak Payung, Jl. Perintis Kemerdekaan No159 Semarang. Telp. (024)7461215.
- 5) KC. Klipang, Ruko Kav 11, Klipang Pesona Asri Golf Semarang. Telp. (024) 76738767.
- 6) KC. Magelang, Ruko Jl. Yos Sudarso No. 11Kauman Magelang. Telp./Fax. (0293) 314727.
- 7) KC. Kebumen, Jl. Kusuma No. 96 Kebumen. Telp.(0287) 382358. Fax (0287) 381164.
- 8) KC. Kendal. Jl. Sukarno Hatta No. 299 Kendal. Telp. (0294)3689934 / Fax. (0294)3689935
- 9) KC. Boyolali. Jl. Pandanaran No. 354 Boyolali. Telp. (0276) 326199 / Fax. (0276) 321945
- 10) KC. Ampel. Gentansari Rt. 01/01 Desa Gledaksari. Kec. Ampel Kab. Boyolali. Telp. (0276) 330880
- 11) KC. Sukoharjo, Jl. Wimboharsono No.18 B Kartosuro. Telp. (0271) 784828 /Fax. (0271) 784829

- 12) KC. Gombong. Jl. Yos Sudarso Timur No. 256 Rt.03/02 Wero Gombong Kebumen.  
Telp. (0287) 473299/Fax. (0287) 473703
- 13) KC. Demak,Ruko Nusa Indah Permai No. 4 Jl. SultanTrenggono DemakTelp./Fax.  
(0291) 682068
- 14) KC. Wonogiri, Jl. Jend. Sudirman 129 Wonogiri (Sukorejo RT. 01/X Giritirto  
Wonogiri )Telp./Fax. (0273) 321111
- 15) KC. Parakan, Kios No. 1 Jl. Kh. Subkhi Parakan TemanggungTelp./Fax. (0293)  
598178
- 16) KC. Purwokerto, Ruko No. 3 Jl. Sultan Agung No. 10 PurwokertoTelp.(0281)  
6843925 /Fax. (0281) 6843924
- 17) KC. Wonosobo, Gedung PCNU Jl. Kauman NO.13 RT/RW 10/XIII Kel Kauman  
Selatan. Telp./Fax. (0286) 322249
- 18) KC. Sragen, Ruko Jl. Raya Sukowati Timur Km 3,8 Ngrampal Sragen. Telp./Fax.  
(0271) 893127
- 19) KC. Sukoharjo II, Jl. Jend. Sudirman No. 243 Desa Ngaglik RT 03/06 Sidorejo  
Bendosari. Telp. (0271) 592128 /Fax. (0271) 592202
- 20) KC. Gubug, Jl. A. Yani 131 RT 03/01 Grobogan. Telp./Fax. (0292) 536100
- 21) KC. STAINU TMG,Jl. Suwandi Suwardi NO. 1 Temanggung
- 22) KC. Pegandon, Jl. Raya KH. Abdul Wahab No. 1 RT. 1/1 Pegandon Kendal
- 23) KC. Banjarnegara, Jl. Letjen S. Parman KM. 2 Parakancangah Banjarnegara
- 24) KC. Majapahit, Jl. Majapahit No. 70 Semarang
- 25) KC. Sudirman, Jl. Jend. Sudirman No. 47 Semarang
- 26) KC. Kaliwungu, Jl. KH. Asyari Kaliwungu Blok B NO. 6 Krajan Kaliwungu Kendal
- 27) KC. Weleri, Jl. Tamtama No. 64 Penyangkringan RT. 4/5 Weleri
- 28) KC. Gayamsari, Jl. Sawah Besar Timur Gg. I Gayamsari Semarang

- 29) KC. Ungaran, Jl. HOS. Cokro Aminoto Ruko No. 6 Alun-alun Ungaran Kab. Semarang
- 30) KC. Banaran, Jl. Taman Siswa Ruko Kav. F. Sekaran Gunungpati Semarang
- 31) KC. Mijen, Ruko Jatisari Peramai Blok B NO. 4 RT. 1/9 Mijen Kota Semarang
- 32) KC. Boja, Jl. Boja Tampingan Km. 1 Ruko Tambora RT. 5/3 Ds. Tampingan KEC. Boja Kendal
- 33) KC. Sumowono, Jl. Palagan Km. 1 Jubelan Sumowono Kab. Semarang
- 34) KC. Sragen II, Jl. Jono Lor RT. 3 Jono Tanon Sragen
- 35) KC. Bawen, Ruko Emperium Sentra Niaga NO. 14 Jl. Palagan Ngrawan Bawen Jateng
- 36) KC. Temanggung, Ruko Komplek PJKA No. 5 Jl. Sri Suwarno Temanggung
- 37) KC. Gemolong, Ruko Jl. Solo - Purwodadi RT. 4/1 Gemolong Kab. Sragen
- 38) KC. Grabag, Jl. Cokro Km. 02 Grabag Magelang
- 39) KC. Sragen III, Dk. Dulangasri RT. 15 Ds. Wonokerso Kec. Kedawung. Kab. Sragen
- 40) KC. Sragen IV, Dk. Harjosari RT. 01 Ds. Majenang Kec. Sukodono Kab. Sragen
- 41) KC. Sukorejo, Ds. Kebumen RT. 01 RW. 02 Kec. Sukorejo Kab. Kendal
- 42) KC. Sragen V, Masaran RT. 25 Ds. Masaran Kec. Masaran Kab. Sragen
- 43) KC. Karanganyar I, Jl. Solo - Sragen KM. 12 Nglarangan RT. 03 RW. 1 Kebak Kebak Kramat Karanganyar
- 44) KC. Karanganyar II, Dk. Mojogedang Ds. Mojogedang RT. 03 RW. 02 Kec. Mojogedang Kab. Karanganyar
- 45) KC. Palur I, Jl. Raya Mojo Palur Tasikmadu Celep Kidul Dagen RT. 2 RW. Jaten Karanganyar
- 46) KC. Palur II, Jl. Nusa Indah IV NO. 17 RT. 17 RW. 14 Perumnas Palur Ngringo Jaten Karanganyar

- 47) KC. Karanggede, Dk. Blandongan RT. 03 RW. 06 NO. 87 Ds. Sranten Kec. Karanggede Kab. Boyolali
- 48) KC. Sragen VI, Ruko Tegrat NO. 7 RT. 01/01 Bulaksari Kel. Tangkil, Sragen
- 49) KC. Jepara, Jl. Raya Jepara Semarang Ruko No. 8 Gedangan Kec. Welahan Kab. Jepara
- 50) KC. Rembang, Jl. Untung Suropati No. 9 RT. 04 RW. 02 Magersari Rembang
- 51) KC. Grobogan, Jl. Raya Purwodadi Solo KM. 9 DK. Toroh Ds. Sindurejo RT. 3 RW. 2 Kec. Toroh Kab. Grobogan
- 52) KC. Pati, Jl. Jepara Tayu Km 1,5 Ruko Tayu Tayu Pati.
- 53) KC. Salatiga, Jl. Dewi Kunti No. 10 RT. 12 RW. 04 Grogol Dukuh Salatiga
- 54) KC. Blora, Jl. Raya Blora Purwodadi Kelurahan Punggursugih RT. 03/01 Kec. Ngawen Kab. Blora
- 55) KC. Salam, Jl. Magelang-jogja Km. 22 Pulosari Jumoyo Salam Magelang
- 56) KC. Kutoarjo, Desa Bayem Kutoarjo Purworejo
- 57) KC. Sleman, Ngemplak RT. 4, RW. 84 Ds. Sendangadi, Kec. Mlati Kab. Sleman

## Data wawancara :

Isi wawancara yang ditujukan kepada Manajer KSPPS BMT NUS SEMARANG

1. Apa arti literasi keuangan bagi BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang?

Jawab : Literasi keuangan anggota menurut pandangan KSPPS BMT NUS Semarang adalah suatu kecerdasan dalam mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan ekonominya.

2. Apakah BMT NU Sejahtera Semarang mengetahui tentang kebijakan OJK tentang pentingnya literasi keuangan bagi anggota lembaga keuangan?

Jawab : Ya mengerti, memang dasar dari program peningkatan literasi keuangan ini adalah Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 76/POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat. Walaupun KSPPS tidak berhubungan langsung dengan OJK namun KSPPS berdiri dibawah naungan BPRS NU yang terhubung langsung dengan OJK, dan juga ranah izin operasional KSPPS masih dalam wewenang OJK.

3. Bagaimana Kontribusi BMT Nusa Ummat Sejahtera Semarang terhadap literasi keuangan para anggotanya?

Jawab : kontribusi yang sudah dilakukan adalah pengupayakan anggota yang menerima pembiayaan dari KSPPS BMT NUS di latih dan diawasi agar tidak hanya memperoleh pembiayaan saja namun anggota dapat menggunakannya dengan bijak.

4. Bagaimana BMT NU Sejahtera Semarang dalam memprioritaskan literasi keuangan untuk anggotanya?

Jawab : pihak KSPPS memprioritaskan literasi keuangan anggota melalui survei lapangan langsung kepada anggota penerima pembiayaan setiap satu minggu sekali dan melakukan memantauan pengelolaan keuangan setiap bulannya.

5. Bagaimana produk-produk didalam BMT NU sejahtera Semarang membimbing para anggota agar lebih mandiri dalam hal finansial?

Jawab : dalam memberi peran literasi keuangan terdapat peran edukasi dimana pihak KSPPS BMT NUS mendidik dengan atau membimbing anggota melalui

produk-produk keuangan dan di didik hingga kemandirian ekonominya telah terbentuk.

6. Bagaimana upaya BMT NU Sejahtera Semarang dalam meningkatkan literasi keuangan para anggotanya?

Jawab : Upaya yang dilakukan adalah melakukan optimalisasi terhadap peran yang telah ditentukan oleh KSPPS BMT NUS Semarang, yaitu melakukan sosialisasi, survei langsung terhadap anggota yang bergerak dibidang UMKM.

7. Menurut BMT NU Sejahtera Semarang mengapa para anggota harus mampu memiliki well literacy financial?

Jawab : literasi keuangan adalah dasar bagi setiap umat dalam mengatur keuangan secara bijak, sehingga anggota dapat menjadi mandiri dan produktif dalam mengelola keuangannya.

8. Apa keuntungan bagi BMT NU Sejahtera Semarang jika para anggotanya memiliki literasi yang baik?

Jawab : keuntungan yang di peroleh KSPPS BMT NUS adalah tjuan kemandirian ekonomi anggota semakin berkembang, citra baik KSPPS BMT NUS menjadi lebih baik, dan operasional semakin baik.

9. Apakah literasi keuangan mampu mengurangi masalah yang terjadi didalam masa penggunaan produk-produk BMT NU Sejahtera Semarang?

Jawab : Literasi keuangan dapat dijadikan alat dasar mengurangi pembiayaan bermasalah pada KSPPS BMT NUS, karna dengan anggota yang memiliki literasi keuangan yang baik akan berdampak pada kemajuan keuangan yang baik.

10. Apa yang menjadi dasar BMT NU Sejahtera Semarang dalam melaksanakan peningkatan literasi keuangan anggota?

Jawab : KSPPS BMT NUS Semarang adalah lembaga keuangan non bank dibawah naungan BPRS NU dimana berhubungan dengan OJK, dan operasional KSPPS BMT NUS dibawah wewenang OJK, jadi yang menjadi dasar literasi keuangan anggota KSPPS adalah OJK yaitu Peraturan otoritas jasa keuangan nomor 76/POJK.07/2016 tentang peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat.

Data beberapa anggota KSPPS BMT NUS Semarang yang terprogram dalam literasi keuangan

Nama	Usaha	Alamat
Bapak Kadar	Penjahit	purwoyoso
Bapak Agung	Warung makan	Bulusari
Bapak sodiq	Martabak Telur	Bulusari
Bapak dodo	Es kelapa muda	Subali Raya
Bapak Aman	Warung makan	Subali Raya
Ibu sari	Penjual aneka kue	indrapasta
Bapak nanang	Warung sembako	Banjirkanal
Bapak hendras	Warung sembako	Anjasmoro
Ibu jati	Warung sembako	Anjasmoro
Bapak sudrajat	Warung gas	Bulusari



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
website : Febi.walisongo.ac.id - Email : febiwalisongo@gmail.com

Nomor : B-2572/Un.10.5/D1/TL.00/09/2018

07 September 2018

Lampiran : --

Hal : Surat Pengantar Izin Riset

Yth.

Pimpinan KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Semarang  
Semarang

Di Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi Untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Riset kepada :

Nama : Inne Febriany  
NIM/Program/Smt : 1405026046 / S.1 / IX  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Alamat : Jl. Binaji Rt.04 Rw.13 Brebes  
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi dalam Ilmu Ekonomi Islam Program S.1  
Judul Skripsi : Peran KSPPS BMT Nusa Umat Sejahtera Semarang dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Anggota  
Waktu Research : 07 September 2018 sampai selesai  
Lokasi Penelitian : KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Semarang

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan Data yang bersangkutan Demikian atas perhatian dan terakabulnya permohonan ini kami ucapkan banvak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



ALI MURTADHO

Tembusan :

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang  
(sebagai laporan)

## Dokumentasi



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Inne Febriany  
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 26 Febuari 1997  
Alamat Asal : jl. Binaji RT.04 RW.14, Gamprit, Brebes  
Nama Ayah : Khujer Yahya  
Nama Ibu : Mulyani  
Email : [Innefeb@gmail.com](mailto:Innefeb@gmail.com)  
Nomor Telepon : 0889 680 796 450

Jenjang pendidikan :

A. Pendidikan Formal :

1. SDN 13 BREBES
2. SMPN 1 WANASARI BREBES
3. MAN 1 BREBES
4. UIN WALISONGO SEMARANG

B. Pendidikan Non Formal :

1. Taman Pendidikan al-Qur'an Nurul Huda
2. Pendidikan Bahasa Inggris di D'Leon Pare Kediri
3. Pondok Pesantren Ma'had Walisongo Semarang

Demikian Daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.